



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 (20 Oktober – 12 November 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
D. TUGAS KHUSUS	1
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	6
A. FUNGSI LEGISLASI	6
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	6
KOMISI IV	11
A. FUNGSI LEGISLASI	11
B. FUNGSI ANGGARAN	11
C. FUNGSI PENGAWASAN	11

KOMISI V	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI VI	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
D. TUGAS KHUSUS	19
KOMISI VIII	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	26
KOMISI IX	31
A. FUNGSI LEGISLASI	31
B. FUNGSI ANGGARAN	31
C. FUNGSI PENGAWASAN	31

KOMISI X	44
A. FUNGSI LEGISLASI	44
B. FUNGSI ANGGARAN	44
C. FUNGSI PENGAWASAN	44
KOMISI XI	52
A. FUNGSI LEGISLASI	52
B. FUNGSI ANGGARAN	52
C. FUNGSI PENGAWASAN	54
KOMISI XII	57
A. FUNGSI LEGISLASI	57
B. FUNGSI ANGGARAN	57
C. FUNGSI PENGAWASAN	57
KOMISI XIII	60
A. FUNGSI LEGISLASI	60
B. FUNGSI ANGGARAN	60
C. FUNGSI PENGAWASAN	60

BADAN LEGISLASI 63

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 82

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 91

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 92

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 97

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Bakamla	RDP Komisi I DPR RI dilaksanakan pada 11 November 2024.	Rencana Program 100 hari kerja Bakamla.	
2.	Kemenlu	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada 12 November 2024.	Menerima kunjungan kehormatan delegasi Rusia yang diketuai oleh Mr. Vladimir Bulavin, Ketua Komite Dewan Federasi Bidang Pertahanan dan Keamanan.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi I DPR RI	Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi I DPR RI dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPR RI tanggal 22 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB.	<ul style="list-style-type: none">- Ketua DPR RI memimpin jalannya pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi I DPR RI- Dengan susunan sebagai berikut Ketua : Drs Utut Adianto/F-PDIP Wakil Ketua : 1. Dr. Dave Akbarshah Fikarno laksono; 2. G Budisatrio Djiwandono; 3. Ahmad Heryawan; 4. Anton Sukartono Suratto	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 2. Lembaga Administrasi Negara 3. Badan Kepegawaian Negara 4. Arsip Nasional Ri 5. Ombudsman Ri	Raker dan RDP dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, ANRI dan Ombudmman RI;- Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB dalam 100 Hari Kabinet Merah Putihp- Dan lain lain .	
2.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri	Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN.- Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih.- Dan lain lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN); - Membicarakan Progres Pembangunan IKN; - Dan lain lain. 	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 	Raker dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 31 oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) - Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih. - Dan lain lain. 	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum 2. Badan Pengawas Pemilu 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran KPU, BAWASLU dan DKPP; - Membicarakan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024; - Dan lain lain. 	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabat Gubernur Sumatera Utara. 2. Ketua Kpu Provinsi Sumut 3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumut; 4. Gakkumdu Provinsi Sumut; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Sumut; 6. Perwakilan Kemendagri 7. Perwakilan Kpu Bawaslu 	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Pusat			
7.	1. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. 2. Ketua Kpu Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Perwakilan Kemendagri 7. Perwakilan Kpu Bawaslu Pusat	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara.	
8.	1. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. 2. Ketua Kpu Provinsi Kalimantan Timur 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; 4. Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Kalimantan Timur; 6. Perwakilan Kemendagri; 7. Perwakilan Kpu Bawaslu	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di IKN, Provinsi Kalimantan Timur.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Pusat; 8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara			
9.	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Penjabat Gubernur Daerah Jakarta 3. Penjabat Gubenur Banten, Bupati/Walikota Se Provinsi Banten; 4. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Penjabat Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Barat; 5. Penjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati/Walikota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Raker dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 pukul 10.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.	
10.	1. Menteri Dalam Negeri; 2. Penjabat Gubernur Jawa Tengah; 3. Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Tengah	Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 pukul 14.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.	
11.	1. Menteri Dalam Negeri; 2. Penjabat Gubernur Jawa Timur; 3. Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Timur.	Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolda Sulawesi Tengah dan jajaran; 2. Kapolda Nusa Tenggara Timur dan jajaran; 3. A.M. Akbar Supratman selaku pendamping Keluarga Alm. Bayu Adhityawan serta Tim Kuasa Hukum dan jajarannya; 4. Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo selaku Ketua Umum Jarnas Anti TPPO serta Kuasa Hukum dari Ipda Rudy Soik. 	<p>RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut RDP & RDPU tanggal 27 September 2024, terkait tewasnya tahanan Polresta Palu a.n. Alm. Bayu Adhityawan. 2. Dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik. 	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap Rudi Soik, dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. 2. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. 3. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya untuk menuntaskan penyidikan terhadap meninggalnya tahanan atas nama Bayu Adhityawan secara menyeluruh, transparan, profesional dan bertanggung jawab serta memberikan sanksi tegas 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kepada para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolresta Palu beserta jajarannya, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan segera menindaklanjuti laporan keluarga Alm. Bayu Adhityawan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Palu atas penetapan tersangka atas nama Alm. Bayu Adhityawan.</p> <p>5. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Nusa Tenggara Timur agar memaksimalkan fungsi pengawasan secara melekat terhadap seluruh anggota Polri di jajaran Polda masing-masing dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas, keadilan dan bertanggung jawab.</p>	
2.	<p>1. Direksi PT. Duta Pertiwi, Tbk.</p> <p>2. Tony Soenanto dan kawan-kawan (Pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas)</p>	RDPU Komisi III DPR RI tanggal 30 Oktober 2024, membahas perkembangan penyelesaian permasalahan pada Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM).	<p>Perwakilan dari PT Duta Pertiwi Tbk dan Sdr. Hery Wijaya selaku Ketua PPRS Graha Cempaka Mas tidak hadir dalam RDPU.</p> <p>Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemilik dan Penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM), maka Komisi III DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi III DPR RI meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk segera melakukan pengesahan pelaksanaan Kelompok</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kerja (Pokja) sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi III DPR RI meminta agar Polda Metro Jaya mempertimbangkan untuk melakukan pemberhentian proses hukum terhadap Tonny Soenanto dan Suresh Bhagwandas Bhavnani yang sedang memperjuangkan penyelesaian permasalahan Apartemen Graha Cempaka Mas. 3. Komisi III DPR RI meminta pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam penyelesaian kasus Apartemen Graha Cempaka Mas agar tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun juga dan segera meninggalkan Apartemen Graha Cempaka Mas dengan pengawalan dari pihak Polri. 4. Komisi III DPR RI meminta kepada institusi Polri agar laporan polisi yang sudah disampaikan oleh Pemilik dan Penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 	Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan penegakan hukum pada sektor Kamtibmas dan sektor sumber daya alam.	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2024; 2. Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2024; dan 3. Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 s.d. 3 November 2024. 	
4.	Kepala PPAATK	Raker Komisi III DPR RI dengan Kepala PPAATK dilaksanakan	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung Rencana Kerja PPAATK Tahun 2025 dalam meningkatkan kualitas program 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>pada tanggal 6 November 2024, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2024 s.d. Oktober 2024. 2. Program kerja PPATK. 	<p>Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara sebagai perwujudan stabilitas perekonomian nasional dan peningkatan integritas sistem keuangan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi III DPR RI mendesak Kepala PPATK untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memantau, menelusuri, mengawasi, mengungkap, dan memberantas tindak pidana terkait transaksi keuangan, khususnya judi <i>online</i>, yang menggunakan berbagai instrumen pembayaran, termasuk <i>cryptocurrency</i>, serta tindak pidana korupsi, narkoba, dan lainnya. 3. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh lembaga terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Analisis (LHA). 	
5.	<i>Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)</i>	<p>RDPU Komisi III DPR RI dengan ICJR dilaksanakan tanggal 7 November 2024, membahas masukan ICJR terkait beberapa RUU berkaitan dengan sistem peradilan pidana.</p>	<p>Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan <i>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)</i> untuk memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Narkotika (RUU operan/<i>carry over</i>) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2025, serta usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2024-2029 (longlist). 2. Komisi III DPR RI akan mengundang <i>Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)</i> dalam setiap penyusunan dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pembahasan RUU di Komisi III DPR RI sebagai bentuk dari partisipasi bermakna.	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolri 2. PJU Dilingkungan Mabes Polri 3. Kapolda seluruh Indonesia 4. Gubernur Akademi Kepolisian 	<p>Raker Komisi III DPR RI dengan Kapolri dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran & capaian kinerja Tahun 2024 serta rencana kerja dan target capaian Polri Tahun 2025. 2. Evaluasi penegakan hukum sumber daya alam dan tindak pidana narkoba. 3. Evaluasi pelaksanaan keamanan & ketertiban masyarakat (kamtibmas). 	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung Polri dalam mewujudkan rencana kerja dan program prioritas Polri T.A. 2025 demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. 2. Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan menindak tegas aksi-aksi kejahatan seperti judi online, perdagangan orang, pungli, narkoba, mafia tanah, pelanggaran HAM dan aksi kejahatan lainnya demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. 3. Komisi III DPR RI mendukung Polri terkait dengan penetapan <i>Grand Strategy</i> dan <i>Roadmap</i> penegakan hukum di bidang sumber daya alam untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan hilirisasi termasuk mencegah kebocoran keuangan negara dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam. 4. Komisi III DPR RI mendukung Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pilkada serentak 2024 dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 dengan: 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 5. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; 6. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia; dan 7. Direktur Utama Perum Bulog.	Permintaan Usulan RUU dalam Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2024-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang 2. Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada 22 Oktober 2024.	Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI: 1. Ketua: Siti Hediati Soeharto, S.E. (A-117)/ Fraksi Partai Gerindra; 2. Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P. (A-162)/ Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua: Ir. Panggah Susanto, M.M. (A-316)/ Fraksi Partai Golongan Karya; 4. Wakil Ketua: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. (A-466)/ Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; 5. Wakil Ketua: Ahmad Yohan, M.Si. (A-522)/ Fraksi Partai Amanat Nasional. 	
2.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; dan 2. Lain-lain. 	-
4.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan pada 5 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-
5.	Direktur Utama Perum Bulog	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 5 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024; 3. Penjelasan Rencana Program Kerja dan Kegiatan serta Program kerja Prioritas TA 2025; dan 4. Isu-isu aktual. 	-
6.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada 6 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pangan Nasional; 2. Kepala Badan Karantina Indonesia. 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 6 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; dan 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	6. Kementerian Pekerjaan Umum 7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 8. Kementerian Perhubungan 9. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 10. Kementerian Transmigrasi 11. BMKG 12. BNPP (Basarnas)	Rapat Kerja dan RDP dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024.	Perkenalan dan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.	
2.	Kementerian PU	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024; 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023; 3. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	1. Kementerian Pekerjaan Umum - Bina Marga 2. Kementerian Perhubungan - Ditjen Hubla - Ditjen Hubdat - DJKA - BPJT,AP	Kunsfik dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 2 November 2024.	1. Pelabuhan Merak – Bakauheni; 2. Bandara Soekarno Hatta; 3. Peninjauan Kereta Cepat Jakarta – Bandung Kota Bandung Prov. Jabar.	
4.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024; 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023; 3. Lain-lain.	
5.	Kementerian Transmigrasi	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024; 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023; 3. Lain-lain.	
6.	Kementerian Perhubungan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024; 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023; 3. Lain-lain.	
7.	Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024.	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024; 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023; 3. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	BMKG dan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan/ Basarnas	RDP dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan November 2024;2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II BPK RI Tahun 2023;3. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dan praktisi yakni Prof. Yohanes Gunawan (Univ. Trisakti) dan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N. dilaksanakan tanggal 11 November 2024.	Dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan terkait dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	
2.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dan praktisi yakni Prof. Yohanes Gunawan (Univ. Trisakti) dan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N. dilaksanakan tanggal 11 November 2024.	Dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan terkait dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Komisi VI DPR RI	Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 22 Oktober 2024.	Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Komisi VI DPR RI	Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 28 Oktober 2024.	Penyusunan dan Pembahasan Program Kerja KomisiVI DPR RI MP. I TS. 2024-2025.	
3.	Komisi VI DPR RI	Rapat Intern KomisiVI DPR RI tanggal 28 Oktober 2024.	Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP. I TS.2024-2025	
4.	a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Ketua BPKN dan Ketua KPPU Tanggal 31 Oktober 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/Lembaga.	
5.	Kementerian BUMN RI	Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI beserta jajarannya Tanggal 4 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/Lembaga.	
6.	Kementerian Koperasi RI	Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI beserta jajarannya Tanggal 6 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/ Lembaga.	
7.	Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Sabang (BPKS)	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) tanggal 6 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/Lembaga.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta Sub Holdingnya	Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta subholdingnya tanggal 12 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024; 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	
9.	Kementerian Koperasi RI	Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI beserta jajarannya Tanggal 6 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/ Lembaga.	
10.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS)	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) tanggal 6 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025. 3. Target Penyelesaian <i>Roadmap</i> Kementerian/Lembaga.	
11.	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta Sub Holdingnya	Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta subholdingnya tanggal 12 November 2024.	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024; 3. Penyampaian rencana kerjadan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	
12.	a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama: a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		e. PT. Bank BSI Tanggal 13 November 2024.		
13.	a. Kementerian BUMN RI b. PT. Pelindo	Kunjungan kerja spesifik ke PT.Pelindo di Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan perkembangan pembangunan Bali <i>Maritim Tourism Hub</i> .	
14.	a. Kementerian BUMN RI b. PT. Brantas Abipraya	Kunjungan kerja spesifik ke PT.Brantas Abipraya di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Sidan.	
15.	a. Kementerian BUMN RI b. Kementerian Perdagangan RI c. Perum Bulog	Kunjungan kerja spesifik ke Perum Bulog di Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan persiapan dukungan sektor pangan menjelang libur natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi VI DPR RI	Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi I DPR RI Dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI tanggal 22 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.	Ketua DPR RI memimpin jalannya pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi VI DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Kepala Pusat Kesehatan Haji, Menteri Perhubungan RI yang diwakili Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, membahas “Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M serta Isu-isu Aktual” pada tanggal 30 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M tidak sesuai dengan Keputusan Panja BPIH tanggal 27 November 2023 dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tetapi hanya mendasarkan pada kebijakan Menteri Agama RI periode 2020-2024. 2. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M sepenuhnya merupakan tanggung jawab Menteri Agama RI sebelumnya (periode 2020-2024). 3. Komisi VIII DPR RI dapat memaklumi efisiensi sebesar Rp601.297.789.718 seperti termuat pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan sepakat untuk mengakhiri pembahasan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M serta dapat memulai pembahasan pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah RI (Kementerian Agama RI dan Lembaga terkait) untuk melakukan perbaikan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kementerian Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda pembahasan “Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual” pada tanggal 12 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan serapan anggaran tahun 2024 karena sampai tanggal 11 November 2024 baru terserap Rp59.948.315.469.462,- (<i>lima puluh sembilan triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah</i>) atau setara dengan 74,95 persen dari pagu anggaran Kemensos RI tahun 2024 sebesar Rp79.980.265.067.000,- (<i>tujuh puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah</i>). 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk mengimplementasikan program kerja dan anggaran Kemensos RI tahun 2025 sebesar Rp79.588.005.512.000,- (<i>tujuh puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah</i>) sesuai dengan target dan anggaran program prioritas yang telah ditetapkan. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong program perlindungan sosial sepanjang hayat dapat dioptimalkan sebagai jangkar perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. b. Memberikan kriteria yang jelas untuk kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem, miskin dan rentan sebagai dasar kebijakan 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Memastikan Kementerian Sosial dan jajaran pendamping sosial untuk bersikap netral pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024. d. Meminta program bantuan sosial dimodifikasi dari pemberian yang bersifat cuma-cuma (<i>charity base</i>) menjadi pemberdayaan (<i>empowerment</i>). e. Mendorong validasi dan digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan cara meningkatkan para pendamping sosial yang “melek IT” agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. f. Perlu sinergi antar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait program penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. g. Mendorong Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) guna mempercepat pengentasan kemiskinan. 	
3.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI membahas “Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025	1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2025 sebesar Rp300.654.181.000 (<i>tiga ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>).	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		serta Isu-isu Aktual” pada tanggal 29 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VIII DPR RI memahami Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Fisik PPA) tahun 2025 sebesar Rp96.961.090.000,- yang ditujukan bagi 42 daerah penerima dan DAK Nonfisik PPA tahun 2025 sebesar Rp132.000.000.000,- yang ditujukan bagi 304 daerah penerima. 3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 4. Komisi VIII DPR RI mendukung koordinasi untuk penguatan kelembagaan dan penambahan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 	
4.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB dengan agenda “Pembahasan Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual” pada tanggal 29 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran BNPB tahun 2024 sampai tanggal 28 Oktober 2024 sebesar Rp2.696.650.868.525,- (<i>dua triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah</i>) atau setara dengan 80,71 persen dari pagu anggaran BNPB tahun 2024 sebesar Rp3.341.315.194.000,- (<i>tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah</i>). 2. Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran BNPB tahun 2025 sebesar Rp1.427.574.663.000,- (<i>satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>). 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam merespons isu-isu kebencanaan. b. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memitigasi daerah-daerah rawan bencana. c. Meningkatkan kerja sama dengan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka kesinambungan program penanggulangan bencana. d. Melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. e. Meningkatkan anggaran untuk mitigasi bencana dan juga anggaran untuk realisasi bantuan bencana termasuk untuk dunia internasional. 4. Komisi VIII DPR RI bersama BNPB akan mengadakan pendalaman berkaitan dengan program dan kelembagaan BNPB dalam upaya meningkatkan penanggulangan kebencanaan. 5. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB untuk melakukan seleksi ulang terhadap calon Unsur Pengarah BNPB. 	
5.	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan	1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengumpulan zakat nasional yang hingga triwulan III tahun 2024 mencapai Rp28.749.783.717.985 (<i>dua puluh delapan triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan</i>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>agenda “Program dan Anggaran Tahun 2025” pada tanggal 29 Oktober 2024.</p>	<p><i>puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah</i>). Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Baznas untuk memaksimalkan capaian pengumpulan zakat nasional.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI mendesak Baznas meningkatkan koordinasi dan sinergi pengumpulan zakat dengan lembaga amil zakat lainnya sehingga target pengumpulan zakat nasional tahun 2025 yang sebesar Rp49.999.769.495.000 (<i>empat puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>) dapat tercapai.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penerimaan wakaf uang tahun 2024 yang mencapai Rp2.970.017.494.780 (<i>dua triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah</i>). Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak BWI agar memaksimalkan penerimaan wakaf uang yang potensinya setiap tahun mencapai Rp181.974.320.880.000 (<i>seratus delapan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI mendesak Baznas dan BWI agar dalam pengelolaan zakat dan wakaf memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: Baznas:</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Memastikan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan, dan teknologi pengelolaan zakat terealisasi.</p> <p>b. Meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penerima manfaat di berbagai negara yang terdampak konflik dan bencana.</p> <p>BWI:</p> <p>a. Meningkatkan pengelolaan lembaga kenazhiran BWI terhadap wakaf uang yang saat ini baru mencapai Rp926,42 miliar (<i>Sembilan ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta rupiah</i>) atau 31,73 % dari total wakaf uang nasional.</p> <p>b. Mendorong penguatan kelembagaan BWI melalui penguatan regulasi dan proaktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 dengan agenda pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia.	1. Komisi VIII DPR RI mendesak KPAI agar meningkatkan realisasi anggaran tahun 2024 yang hingga bulan Oktober mencapai Rp10.503.233.365 (<i>sepuluh miliar lima ratus tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah</i>) atau 73,64 % dari pagu yang sebesar Rp14.263.522.000 (<i>empat belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah</i>).	-

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VIII DPR RI mendesak KPAI agar meningkatkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang dirumuskan berdasarkan hasil pengawasan ditindaklanjuti. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak KPAI agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran KPAI dalam penyelesaian berbagai permasalahan perlindungan anak melalui langkah-langkah pro aktif, bukan hanya berdasarkan pengaduan. b. Meningkatkan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) dalam memberikan perlindungan terhadap anak, melalui peningkatan partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. c. Meningkatkan sinergitas dan komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI dalam penanganan permasalahan perlindungan anak. 	
2.	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)	Rapat Dengar Pendapat Umum ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 dengan fokus pembahasan pada pembimbingan dan pendampingan ibadah kepada jamaah haji dan umrah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah (FKBIHU). 2. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah (FKBIHU) menyampaikan usulan dan saran di antaranya: 	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Mendorong Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan secara seksama dalam rangka efektivitas pelaksanaan bimbingan kepada jemaah haji yang berdaya guna dan berhasil guna serta lebih optimal dalam pelaksanaan pendampingan jemaah selama di Arab Saudi, maka kuota bagi pembimbing ibadah KBIHU setiap 135 jemaah berlaku kelipatan.</p> <p>b. Jika ada perubahan kebijakan ke depan (revisi UU No. 8 tahun 2019), kuota untuk pembimbing ibadah dari unsur KBIHU bukan lagi 1:135 tapi idealnya adalah 1:45 (1 orang pembimbing mendampingi 45 jemaah) atau sekurang-kurangnya 1:90 (1 orang pembimbing mendampingi 90 jemaah).</p> <p>c. <i>Living Cost</i> dikembalikan ke 1.500 Riyal atau jika tidak memungkinkan sekurang kurangnya sama dengan tahun 2024 dan dibagikan dalam bentuk Riyal, untuk menghindari perbedaan kurs jika ditukarkan oleh para jemaah haji di asrama haji embarkasi.</p> <p>d. Biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul akibat dari pemberlakuan syarat istithoah kesehatan jemaah sebelum syarat pelunasan Bipih, agar dibahas secara seksama antara Komisi VIII DPR RI, Kemenag, Kemenkes, dan BPJS, agar bisa ditanggung/di cover biaya pemeriksaan kesehatan jemaah oleh BPJS, namun jika tetap menjadi beban jemaah haji, maka besaran biaya kesehatan di</p>	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>masing-masing wilayah tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Dalam hal penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji reguler, dapat melibatkan peran FK-KBIHU untuk memberikan saran dan masukan. f. Mengusulkan masjid sebagai tempat sarana dan prasarana pembimbingan Ibadah Haji. g. Biaya untuk Pembimbing Ibadah Haji dari KBIHU agar besarnya disamakan seperti jemaah haji reguler, bukan <i>real cost</i> pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. <p>3. Pimpinan aan Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong KBIHU untuk membuka kesempatan kepada Pembimbing Perempuan yang bersertifikasi untuk menjadi Pembimbing Ibadah Haji. b. Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau Laboratorium Kesehatan (Labkes) untuk jemaah haji yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan seharusnya tidak hanya di satu tempat saja. c. Mendorong KBIHU untuk berkoordinasi dengan TPIH dan TPHD dalam melakukan pembimbingan kepada jemaah haji. 	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none">d. Mendorong adanya standar minimum seperti batasan usia, dalam hal pelayanan kepada jemaah haji yang menjadi bimbingan dan pendampingan KBIHU.e. Mempertimbangkan kembali kuota jemaah haji yang diberikan kepada KBIHU agar tidak mengambil hak jemaah haji reguler.f. Mengantisipasi peran KBIHU di masa mendatang dikarenakan Pemerintah Arab Saudi telah mempersiapkan Pembimbing Ibadah Haji agar menjadi Haji Mandiri.g. Mendorong KBIHU untuk melakukan pengecekan kesehatan jemaah haji minimal 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Komisi IX DPR RI	Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, pukul 16.00 WIB.	Rapat menetapkan dan mengesahkan Paket Pimpinan Komisi IX DPR RI Periode 2024-2029 adalah sebagai berikut : 1. Ketua : Felly Estelita Runtuwene, S.E (A-416) Fraksi Partai Nasional Demokrat 2. Wakil Ketua : Charles Honoris (A-176) Fraksi PDI Perjuangan 3. Wakil Ketua : M. Yahya Zaini, S.H. (A-331) Fraksi Partai Golongan Karya 4. Wakil Ketua : drg. Putih Sari (A-100) Fraksi Partai Gerindra 5. Wakil Ketua : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (A-42) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Rapat Intern Komisi IX DPR RI	Perkenalan Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2024-2029 dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.	Rapat Intern Komisi IX DPR RI pada hari ini melaksanakan perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI	
3.	Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI	1. Penyusunan Program kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan	Tertutup	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		1 Tahun Sidang 2024-2025 2. Lain-lain. Dilaksanakan pada Kamis, 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.		
4.	Rapat Intern Komisi IX DPR RI	1. Penyusunan Program kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; 2. Lain-lain. Dilaksanakan pada Kamis, 24 oktober 2024, pukul 14.00 WIB.	Tertutup	
5.	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Perjuangan (KTKI-P)	Rapat Audiensi dilaksanakan pada Senin, 28 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB dengan agenda membahas Kontroversi PHK Anggota KTKI dan Proses Seleksi KKI yang tidak sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> .	Komisi IX DPR RI mengapresiasi dan menerima masukan dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Perjuangan (KTKI-P), masukan tersebut akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI pada saat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja terkait.	
6.	Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB, dengan agenda:	1. Komisi IX DPR RI mendorong Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, pengembangan dana Jaminan Sosial dan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Program Kerja Tahun 2025. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan Program Perlindungan Paripurna Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para pekerja dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. menyederhanakan prosedur klaim agar lebih efisien tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi yang ada; b. program edukasi bagi pekerja mengenai hak dan akses layanan jaminan sosial yang tersedia sehingga membantu pekerja memahami dan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki setelah kehilangan pekerjaan. 3. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas potensi kepesertaan baik Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). 4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam RDP hari ini paling lambat Senin, 4 November 2024. 	
7.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR mendesak Badan POM RI menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) dalam menjalankan visi Presiden guna mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk peningkatan anggaran seiring dengan meningkatnya tantangan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendirian LOKA POM di beberapa daerah untuk menjangkau daerah yang jauh dari jangkauan Balai dan Balai Besar POM; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Memperbanyak mobil laboratorium agar pemeriksaan produk obat dan makanan bisa dilakukan dengan cepat; c. Peningkatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang baik dan sehat; dan d. Pendampingan yang lebih intensif terhadap UMKM di bidang pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik. <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengambil respon cepat dalam penanganan kasus pelanggaran keamanan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengetatan peredaran terhadap bahan baku/bahan tambahan yang mengandung bahan berbahaya bagi produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini paling lambat Selasa, 5 November 2024.</p>	
8.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI; 2. Penjelasan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengenai Visi dan Misi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan visi Presiden, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program 100 hari dengan indikator yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan visi Presiden dalam pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas; b. Melakukan kolaborasi, koordinasi, dan edukasi yang intensif terkait perubahan nomenklatur dari badan menjadi kementerian, agar substansi program tetap relevan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Presiden RI di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN mempertajam program kerja tahun 2025 dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, di antaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, untuk percepatan capaian program Pembangunan Keluarga, termasuk memastikan jaminan kesehatan bagi penduduk usia lansia; b. Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk perluasan akses terhadap pelatihan bagi penduduk usia produktif; c. Menyusun strategi konkrit dalam penguatan program kesehatan reproduksi remaja dengan mengintegrasikan isu kesehatan jiwa; d. Penguatan PLKB, kader kesehatan, kader PKK dan aparatur desa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penggerak masyarakat. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN menyusun strategi yang jelas untuk melaksanakan program-program yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan stunting, khususnya mengembangkan basis data yang efektif dengan memperhatikan survei dan pencatatan yang akurat. 4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi IX DPR RI atas Percepatan Penurunan Stunting serta melaporkan ke Komisi IX DPR RI atas pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan. 5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk memastikan kesejahteraan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Petugas Lapangan Penanganan Stunting, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan stunting dengan mengikutsertakan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dalam Rapat Kerja hari ini untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Selasa, 5 November 2024.</p>	
9.	Kementerian Ketenagakerjaan RI	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Ketenagakerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendukung arah kebijakan ketenagakerjaan dalam menjalankan visi Presiden, termasuk lima program prioritas bidang ketenagakerjaan, kebijakan <i>triple skilling</i> pelatihan vokasi dan transformasi sistem informasi pasar kerja. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengarusutamakan asas perlindungan dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang tergambar secara konkrit dalam peraturan perundangan-undangan, anggaran dan program ketenagakerjaan. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan percepatan pelaksanaan program strategis bidang ketenagakerjaan, khususnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bersinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam memperluas akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai daerah, termasuk penguatan program BLK Komunitas; b. Berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; c. Mengkaji batas usia kerja produktif bagi tenaga kerja; dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pencegahan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex dan memastikan adanya perlindungan kepada tenaga kerja.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan jumlah formasi tenaga pengawas ketenagakerjaan dan tenaga mediator hubungan industrial di daerah.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 6 November 2024.</p>	
10.	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan visi Presiden, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pematapan transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian, termasuk perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi, Tata Kelola (SOTK), anggaran dan program; b. menyusun program 100 hari dengan indikator yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan visi Presiden dalam pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia; c. menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) arah kebijakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia lima tahun ke depan yang dilengkapi dengan data dan sistem informasi kebutuhan dan ketersediaan jenis pekerjaan di negara penempatan. 2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI segera menuntaskan pemetaan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam menyusun program prioritas, dengan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, di antaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah; b. Perbaiki program perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dan program jaminan social kesehatan; dan c. Penertiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar tunduk terhadap regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI untuk merevisi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penataan dan perbaikan tata kelola pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. 5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI/BP2MI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 6 November 2024. 	
11.	Menteri Kesehatan RI	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan Visi Presiden, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan kecukupan anggaran untuk program prioritas, khususnya alokasi anggaran untuk program imunisasi 14 (empat belas) antigen; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2. Penjelasan Menteri Kesehatan RI mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Kesehatan.</p>	<p>b. Memastikan anggaran untuk penanganan tuberkulosis (termasuk skrining dan pengobatan) tidak tumpang tindih dengan program lainnya terutama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</p> <p>c. Menjamin anggaran untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;</p> <p>d. Memperkuat puskesmas, rumah sakit, dan menjamin kesejahteraan bagi SDM kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil;</p> <p>e. Melakukan afirmasi pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memaksimalkan pemberian beasiswa yang didistribusikan secara proporsional di seluruh Indonesia; dan</p> <p>f. Segera menyelesaikan dan mensahkan seluruh peraturan pelaksana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagai dasar regulasi dalam transformasi kesehatan.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program <i>Quick Win</i> secara optimal, dengan tetap memprioritaskan dan mengakselerasi program-program kesehatan nasional yang telah disepakati untuk Tahun Anggaran 2025, termasuk penanganan <i>stunting</i>, digitalisasi, program imunisasi, presentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan (nakes) standar, penanganan penyakit tidak menular yang bersifat katastrofik, dan penyakit menular seperti <i>dengue</i>.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melaporkan kepada Komisi IX DPR RI terkait perubahan nomenklatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) agar disesuaikan dengan konsep transformasi kesehatan, termasuk penjelasan mengenai tupoksi masing-masing unit dan pergeseran program.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan darah demi memastikan keamanan dan keselamatan pasien dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperketat pengawasan terhadap praktik pengelolaan darah khususnya dalam hal pemenuhan standar mutu, pelayanan, dan prosedur di seluruh Indonesia agar sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan standar WHO, dengan melibatkan Badan POM RI dan dinas kesehatan; b. Memastikan agar seluruh pengelolaan darah hanya dilakukan oleh Unit Pengelola Darah (UPD) milik pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI); dan c. Membuat standar pelayanan medis transfusi darah melalui Panduan Praktik Klinis (PPK) atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). <p>5. Dalam pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait, termasuk anggota KTKI purna, tentang mekanisme pemilihan anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) agar tetap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan b. Mengoptimalkan peran kolegium dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) serta memastikan keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang berlandaskan pada <i>best practices</i> dan <i>evidence-based medicine</i>. <p>6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi dan memberikan laporan kepada Komisi IX DPR RI terkait pelaksanaan Program Pendidikan Kedokteran Spesialis berbasis rumah sakit (<i>hospital based</i>).</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini paling lambat Kamis, 7 November 2024.	
12.	Badan Gizi Nasional	<p>Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Gizi Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendukung program dan kegiatan dari Badan Gizi Nasional RI. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional RI menyampaikan rincian program, indikator keberhasilan, dan anggaran termasuk bila ada sumber pembiayaan lainnya untuk Tahun Anggaran 2025, ke Komisi IX DPR RI, setelah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Badan Gizi Nasional RI ditetapkan. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional RI untuk melaksanakan ekosistem dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi lintas sektoral secara intensif dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan gizi, kualitas, keamanan pangan olahan termasuk memastikan bebas dari bahan berbahaya dan sesuai standar gizi anak; b. Memberdayakan sumber daya lokal dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan bahan baku; c. Mempersiapkan sistem monitoring dan evaluasi Program MBG yang dilakukan secara berkala; d. Mengintensifkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program MBG; e. Memastikan sistem pengolahan limbah yang aman dan ramah lingkungan (<i>food waste management</i>) dari dapur program MBG; dan f. Memastikan sistem pelaporan yang akan diterapkan dalam program MBG. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional RI memastikan rincian perencanaan dan pelaksanaan <i>pilot project</i> Program MBG di tahun 2024, mekanisme koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait, guna memastikan data penerima manfaat dan penyediaan bahan baku.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional RI akan melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), untuk membahas lebih detail terkait rencana implementasi program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2025 Badan Gizi Nasional RI.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini, paling lambat Kamis, 7 November 2024.</p>	
13.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dilaksanakan tanggal 1 – 3 November 2024 Bidang Kesehatan ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bogor, Jawa Barat; 2. Kota Depok, Jawa Barat; 3. Kabupaten Tangerang, Banten. 	<p>Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.</p>	
14.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dilaksanakan tanggal 7 – 9 November 2024 Bidang Kesehatan (BPOM) ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bogor, Jawa Barat 2. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 	<p>Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI;</p>	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 - 2025
(20 Oktober – 12 November 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Kota Tangerang, Banten		
15.	Rapat Internal Komisi IX DPR RI	Penyusunan Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI Prolegnas 2024-2029 dilaksanakan pada Senin, 11 November 2024, pukul 13.00 WIB.	Tertutup	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Selasa, 22 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI Agenda: Pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi X DPR RI periode 2024-2029 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra.	Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. Pimpinan Komisi X DPR RI periode 2024—2029 terpilih dan ditetapkan sebagai berikut: Ketua: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P (FPG) Wakil Ketua : MY Esti Wijayati, S.H. (FPDI Perjuangan), Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (FPGerindra), H. Lalu Hadrian Irfani, S.T. (FPKB), dan Mahfudz Abdurrahman, S.Sos. (FPKS)	
2.		Selasa, 22 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI	Rapat tertutup.	
3.		Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB Rapat Pimpinan Komisi X DPR RI	Rapat tertutup.	
4.		Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI	Rapat tertutup.	
5.		Senin, 28 Oktober 2024	Rapat tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pukul 13.30 WIB Rapat Pimpinan Komisi X DPR RI		
6.	Kepala Badan Keahlian DPR RI	Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB RDP Komisi X DPR RI.	Rapat tertutup.	
7.		Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI.	Rapat tertutup.	
8.	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPI 2. Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) 3. Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA) 4. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK)	Selasa, 30 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI Agenda: Mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan bidang pendidikan.	Komisi X DPR RI mendorong hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • perbaikan tata kelola guru menjadi satu sistem yang berkeadilan, serta berfokus pada mutu dan kesejahteraan guru. • revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • perbaikan mutu lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) secara komprehensif meliputi standar profesi guru yang digunakan sebagai dasar untuk pendidikan prajabatan, rekrutmen guru baru, penempatan, dan pemindahan, pelatihan dan pembinaan profesi berkelanjutan, sertifikasi, promosi, dan penggajian baru. • pengembangan kurikulum yang menanamkan pendidikan karakter dan budi pekerti, serta budaya, dengan memberikan ruang dan akses pendidikan kepada masyarakat adat yang termarjinalkan. • mendorong pengamat pendidikan untuk membantu mengawal setiap pelaksanaan politik anggaran, termasuk DAK pendidikan dan pengelolaan 20% anggaran pendidikan, terutama keefektifan anggaran pendidikan yang dikelola K/L lain. 	
9.	Menteri Pemuda dan Olahraga RI	Senin, 4 November 2024 Pukul 15.00 WIB	Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Kevin Diks, Sdr. Noa	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rapat Kerja Komisi X DPR RI Agenda: Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Kevin Diks, Sdr. Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, Sdr. Estella Raquel Loupattij.	Johanna Christina Cornelia Leatomu, Sdr. Estella Raquel Loupattij, dengan catatan sebagai berikut, <ul style="list-style-type: none"> • Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenerasi pemain, dan evaluasi yang berkelanjutan. • Mendesak Pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya Indonesia bagi olahragawan naturalisasi, dan memperhatikan kritik masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi olahragawan dapat menghalangi potensi olahragawan lokal. 	
10.		Selasa, 5 November 2024 Pkl 11:30 WIB (setelah rapat paripurna) Rapat Pimpinan Komisi X DPR RI.	Rapat Tertutup.	
11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Indonesia (UI) 2. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) 3. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) 4. Direktur Eksekutif Centre For Innovation Policy and Governance (CIPG) 	Selasa, 5 November 2024 Pkl 13.00 WIB RDP/RDPU Komisi X DPR RI. dengan: Agenda: Mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan bidang riset dan teknologi.	Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • mendorong Perguruan Tinggi agar memiliki Peta Jalan Riset dan Inovasi, merealisasikan riset dan inovasi ke arah hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) hingga pada akhirnya menjadi sumber pendanaan mandiri bagi perguruan tinggi. • mendorong Perguruan Tinggi agar hasil riset dan inovasi yang dirintis dan dikembangkan, dapat diwujudkan ke arah industrialisasi sehingga meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri yang merupakan salah satu misi Asta Cita pemerintah. • mendorong pemerintah segera menerbitkan 22 (dua puluh dua) Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 (tiga) Peraturan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) agar riset dan inovasi dapat segera terimplementasi secara menyeluruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi dosen, melalui pemanfaatan program Beasiswa S3 yang dikelola oleh Kemendikstisainstek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). • mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait kompetensi dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan agar tercapai kesetaraan dan keadilan. • mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dana riset. 	
12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 3. Menteri Kebudayaan 	<p>Rabu, 6 November 2024 Pkl 09:00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI. Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan beserta jajaran. 2. Gambaran umum arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan periode 2024— 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI bersama Kemdikdasmen RI, Kemdikstisainstek RI dan Kementerian Kebudayaan RI memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, mengembangkan sains dan teknologi, serta memajukan kebudayaan Indonesia. • Komisi X DPR RI menekankan Kemdikdasmen RI, Kemdikstisainstek RI dan Kementerian Kebudayaan RI agar dalam merumuskan kebijakan dan program kerjanya dipastikan memiliki; (a) landasan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) hasil kajian yang komprehensif; dan (c) hasil evaluasi yang cermat dari kebijakan dan program sebelumnya. • Komisi X DPR RI menekankan Kemdikdasmen RI, Kemdikstisainstek RI dan Kementerian Kebudayaan RI untuk mereviu Peraturan Menteri (Permen) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2029. 3. Lain-lain.</p>	<p>bidang pendidikan dan kebudayaan yang memiliki potensi bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP dan Perpres).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L lain agar: (a) implementasi distribusi 20 % anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi dan undang-undang; (b) anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dikelola kementerian yang membidangi pendidikan. • Komisi X DPR RI mendorong Mendikdasmen RI, Mendiktisaintek RI dan Menteri Kebudayaan RI untuk segera menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya agar dapat maksimal dalam melaksanakan kebijakan, program dan tugas-tugas kementerian, serta mengkaji konsekuensi terhadap OPD di daerah. • Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI dan Kemendiktisaintek RI untuk mempersiapkan kajian revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (NA dan RUU) untuk diajukan sebagai RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2025. • Komisi X DPR RI mendorong Kemdikdasmen RI, Kemdiktisaintek RI dan Kementerian Kebudayaan RI untuk membangun pola komunikasi yang baik sebagai mitra kerja, agar kebijakan dan program yang dikeluarkan bermanfaat untuk masyarakat dan dikordinasikan hasilnya kepada Komisi X DPR RI. 	
13.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Rabu, 6 November 2024 Pkl 13.30 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI.	Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Menpora RI terkait kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2024—2029, untuk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Agenda: 1. Perkenalan Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta jajaran. 2. Gambaran umum arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2024—2029. 3. Lain-lain.	dipelajari dan dilakukan pendalaman dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun.	
14.		Rabu, 6 November 2024 Pkl 15.00 WIB Rapat Pimpinan bersama Kapoksi komisi X DPR RI.	Rapat tertutup.	
15.	Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas)	Rabu, 6 November 2024 Pkl 16.00 WIB RDP Komisi X DPR RI. Agenda: 1. Perkenalan Pejabat Perpusnas beserta jajaran. 2. Gambaran umum arah kebijakan Perpusnas periode 2024—2029. 3. Lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Perpusnas RI terkait capaian kinerja Perpustakaan Nasional tahun 2024 dan arah kebijakan Perpustakaan Nasional RI periode 2024-2029, untuk (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan (b) peningkatan budaya kegemaran membaca dan (c) perlindungan dan pelestarian warisan budaya. • Komisi X DPR RI bersama Perpusnas RI bersepakat untuk peningkatan anggaran, penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah nusantara, standardisasi dan pembinaan perpustakaan, peningkatan sinergitas dengan kementerian/lembaga, dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu. • Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI melakukan alih media bahan pustaka seperti buku, koran, majalah, mikrofilm, ke dalam bentuk digital untuk mengantisipasi kerusakan, menjaga kelestarian, mengoptimalkan pemanfaatan, memperluas akses bacaan, dan mempermudah layanan perpustakaan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
16.	Wakil Dubes Australia	<p>Kamis, 7 November 2024 Pkl 10.00 WIB Pimpinan Komisi X menerima <i>Courtesy Call</i> Agenda: Membahas prioritas dan potensi kerja sama antara Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dengan Komisi X DPR RI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mengapresiasi kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam bidang pendidikan, antara lain pemberian beasiswa internasional S2, S3, kursus singkat, program kerja sama pertukaran dosen, pembukaan 3 (tiga) perguruan tinggi Australia di Indonesia. Dalam bidang kebudayaan, yaitu program orkestra dan pemberian beasiswa khusus perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari daerah 3T. Komisi X DPR RI berharap agar kerja sama ini dapat terus ditingkatkan. • Komisi X DPR RI mendorong adanya kerja sama mengenai pengembangan kurikulum pendidikan, pelestarian bahasa Indonesia, dan peningkatan kerja sama dalam pemberian beasiswa. • Komisi X DPR RI mendorong adanya kerja sama dalam bidang pemuda dan olahraga, melalui program pertukaran pemuda, kursus singkat kepemimpinan pemuda, pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
17.	1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)	Pkl 13:00 WIB RDP Komisi X DPR RI Agenda: 1. Perkenalan Pejabat BRIN, dan BPS beserta jajaran. 2. Gambaran umum arah kebijakan BRIN, dan BPS periode 2024—2029. 3. Lain-lain.	Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X mendukung program Arah Kebijakan BRIN 2025--2029 dan Arah Kebijakan BPS 2025--2029 yang telah dicanangkan. • Komisi X DPR RI mendorong BRIN untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang digunakan sebagai basis perencanaan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam perumusan serta pengambilan kebijakan strategis nasional. • Komisi X DPR RI mendorong BPS sebagai penyedia data statistik dan indikator utama pembangunan, untuk menyajikan data statistik yang berkualitas dan menjadi referensi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam perumusan kebijakan berbasis data. • Komisi X DPR RI mendukung BPS untuk membangun sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk itu Komisi X DPR RI akan mendorong percepatan penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Tentang Statistik untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025. • Komisi X DPR RI menerima seluruh paparan yang disampaikan BRIN dan BPS, materi paparan akan menjadi bahan bagi Komisi X DPR RI untuk mengkaji kebijakan dan regulasi bidang riset dan inovasi serta statistik yang bertujuan 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Gubernur Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja BI Triwulan III Tahun 2024; 2. Pengantar Pembahasan RATBI Anggaran Operasional Tahun 2025 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025; 3. Pembentukan Panja: <ol style="list-style-type: none"> a) Penerimaan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2025; b) Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI Tahun 2025 dan Rencana 	<p>Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia mengenai Kinerja BI Triwulan III Tahun 2024 serta pengantar RATBI Operasional Tahun 2025 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025. 2. Pendalaman pembahasan RATBI Operasional Tahun 2025 dan RPCT Tahun 2025 dijadwalkan pada tanggal 6 s.d. 7 November 2024 di Sheraton <i>Grand</i> Jakarta Gandaria <i>City</i> Hotel, Jakarta Selatan. 3. Pengambilan keputusan RATBI Operasional Tahun 2025 dan RPCT Tahun 2025 dilaksanakan setelah pembahasan Panitia Kerja Penerimaan RATBI Operasional Tahun 2025 serta Panitia Kerja Pengeluaran RATBI Operasional Tahun 2025 dan RPCT Tahun 2025. 4. Gubernur Bank Indonesia memberikan data-data dan dokumen serta jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI pada saat pelaksanaan Rapat Panja Penerimaan RATBI Operasional Tahun 2025 serta Panitia 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025.</p> <p>Rapat kerja dilaksanakan tanggal 6 November 2024.</p>	<p>Kerja Pengeluaran RATBI Operasional Tahun 2025 dan RPCT Tahun 2025.</p>	
2	Deputi Gubernur Bank Indonesia	<p>Rapat Panja Penerimaan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 6 November 2024.</p>	<p>Tertutup.</p>	
3	Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia	<p>Rapat Panja Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI Tahun 2025 dan RPCT Bank Indonesia Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 6 November 2024.</p>	<p>Tertutup.</p>	
4	Deputi Gubernur Bank Indonesia	<p>Rapat Panja Penerimaan Anggaran Operasional RATBI Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 7 November 2024.</p>	<p>Tertutup.</p>	
5	Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia	<p>Rapat Panja Pengeluaran Anggaran Operasional RATBI Tahun 2025 dan RPCT Bank Indonesia Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 7 November 2024.</p>	<p>Tertutup.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																								
1	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2024 dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi XI DPR RI.	<p>Disetujui dan disepakati Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi XI DPR RI, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Nama</th> <th>No. Anggota</th> <th>Fraksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.</td> <td>A-324</td> <td>Partai Golkar</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td> <td>: Dolfie O.F.P.</td> <td>A-197</td> <td>PDI Perjuangan</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td> <td>: Mohamad Hekal, B.Sc., M.B.A.</td> <td>A-115</td> <td>Partai Gerindra</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td> <td>: Fauzi H. Amro, M.Si</td> <td>A-375</td> <td>Partai Nasdem</td> </tr> <tr> <td>Wakil Ketua</td> <td>: Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si.</td> <td>A-37</td> <td>PKB</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Nama	No. Anggota	Fraksi	Ketua	: Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.	A-324	Partai Golkar	Wakil Ketua	: Dolfie O.F.P.	A-197	PDI Perjuangan	Wakil Ketua	: Mohamad Hekal, B.Sc., M.B.A.	A-115	Partai Gerindra	Wakil Ketua	: Fauzi H. Amro, M.Si	A-375	Partai Nasdem	Wakil Ketua	: Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si.	A-37	PKB	
Keterangan	Nama	No. Anggota	Fraksi																									
Ketua	: Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.	A-324	Partai Golkar																									
Wakil Ketua	: Dolfie O.F.P.	A-197	PDI Perjuangan																									
Wakil Ketua	: Mohamad Hekal, B.Sc., M.B.A.	A-115	Partai Gerindra																									
Wakil Ketua	: Fauzi H. Amro, M.Si	A-375	Partai Nasdem																									
Wakil Ketua	: Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si.	A-37	PKB																									
2	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2024 dalam rangka Perkenalan Nama Anggota Komisi XI DPR RI.	Pada Rapat Internal pertama Komisi XI DPR RI melakukan perkenalan Nama-nama Anggota Komisi XI DPR RI dan menyepakati untuk membuat Whatsapp Grup untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar Anggota Komisi XI DPR RI.																									
3	Rapat Pimpinan	Rapat dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2024 dalam rangka Penyusunan dan penetapan Jadwal Komisi XI DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.	Tertutup.																									
4	Rapat Pimpinan	Rapat dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2024 dalam rangka Penyusunan dan penetapan Jadwal Komisi XI DPR RI Masa	Tertutup.																									

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Sidang I Tahun Sidang 2024-2025		
5	Rapat Internal	Rapat dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2024 dalam rangka Pengesahan dan penetapan Jadwal Komisi XI DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.	Tertutup.	
6	Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024.	RDPU dilaksanakan tanggal 4 November 2024 dalam rangka <i>Fit and Proper Test</i> dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024 yang mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) KAP WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN; 2) KAP SYARIEF, WIBAWA & REKAN; 3) KAP HENDRAWINATA HANNY, ERWIN & SUMARGO; 4) KAP DOLI, BAMBANG, SULISTYANTO, DADANG & ALI; dan 5) KAP TARMIZI ACHMAD. 2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Audit; b. Objek Pemeriksaan; c. Metode Pemeriksaan; d. Upaya Menjamin Kualitas Pemeriksaan; e. Subyek Pelaksana Pemeriksaan; f. Jangka Waktu Pemeriksaan; dan g. Keandalan KAP dibanding KAP lainnya. <p>Penjelasan terkait <i>Fit and Proper Test</i> KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024 sebagaimana terlampir.</p>	
7	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 4 November	Tertutup.	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 - 2025
(20 Oktober – 12 November 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2024 dilaksanakan dalam Pengambilan Keputusan Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024, pukul 14.00 WIB.	Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi XII.	
2.	Rapat Pimpinan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024, pukul 15.00 WIB.	1. Penyusunan Jadwal Rapat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 –2025. 2. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 –2025. 3. Pembentukan Panja Minerba, Panja Ketenagalistrikan, Panja Migas, dan Panja Lingkungan Hidup.	
3.	Rapat Intern	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	1. Penyusunan Jadwal Rapat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 –2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024, pukul 16.00 WIB.	2. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 –2025. 3. Pembentukan Panja Minerba, Panja Ketenagalistrikan, Panja Migas, dan Panja Lingkungan Hidup.	
4.	Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024, pukul 20.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Rencana Program Kerja 100 hari. 4. Program Strategis Tahun 2025. 5. Lain-lain.	
5.	Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Penyampaian Isu-isu strategis bidang Komisi XII. 2. Perkembangan Penyusunan dan Pembahasan RUU Bidang Komisi XII. 3. Penyampaian tugas dan fungsi Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI. 4. Lain-lain.	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPD RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada Tanggal 8-11 November 2024.	1. Lapangan Pertamina Blok Tambun, Bekasi, Jawa Barat. 2. PLTU Lontar, Kab. Tangerang, Banten. 3. TBBM Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Dirjen Minerba KESDM RI dengan menghadirkan Direktur Utama PT Weda Bay Nickel dan Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Minerba dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, pukul 11.00 WIB.	1. <i>Progress</i> RKAB. 2. Lain-lain.	
8.	Dirjen Minerba KESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024, pukul 11.00 WIB.	1. Pemetaan Wilayah Kerja Tambang Mineral. 2. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan	Rapat Pimpinan Penetapan Program Kerja Komisi XIII pada MS I TS 2024-2025 dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.	Menetapkan Rancangan Jadwal Kegiatan Komisi XIII	
2.	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	RDP dilaksanakan pada 30 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran BNPT; 2. Penyampaian sekilas tentang kelembagaan BNPT.	
3.	Kepala Staf Kepresidenan	RDP dilaksanakan pada 30 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB.	1. Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran KSP; 2. Penyampaian sekilas tentang kelembagaan KSP.	
4.	Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri Ham)	Raker dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Kementerian HAM; 2. Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Kementerian HAM.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, Kepala BPIP, Sekjen DPD, dan Plt. Sekjen MPR RI	RDP dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Komnas HAM, LPSK, BPIP, Setjen DPD RI dan Setjen MPR RI; Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Komnas HAM, LPSK, BPIP, Setjen DPD RI dan Setjen MPR RI. 	
6.	Menteri Hukum	Raker dilaksanakan pada 4 November 2024 pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Kementerian Hukum; Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Kementerian Hukum. 	
7.	Menteri Hukum dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, dan Sekjen PSSI	Raker dilaksanakan pada 4 November 2024 Pukul 13.00 WIB.	<p>Persetujuan Pemberian Kewarganegaraan RI kepada 3 Atlet Sepakbola WN Belanda, an:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kevin Diks Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu Estella Raquel Loupattij 	
8.	Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	Raker dilaksanakan pada 5 November 2025 Pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 	
9.	<ol style="list-style-type: none"> Kantor Imigrasi Kota Surabaya, Jatim Kantor Imigrasi Solao, Jateng LP Sukamiskin, Bandung, Jabar 	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada 6-8 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> Pertemuan dan Peninjauan Kantor Imigrasi Surabaya Pertemuan dan Peninjauan Kantor Imigrasi Solo Pertemuan dan Penin-jauan Lapas Sukamiskin 	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 - 2025
(20 Oktober – 12 November 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	Menteri Sekretaris Negara	Raker dilaksanakan pada 13 November 2024 Pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Kementerian Sekretaris Negara2. Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Kementerian Sekretaris Negara	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Badan Legislasi, Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 17.24 WIB dalam rangka Penetapan Pimpinan Badan Legislasi Periode 2024—2029.	<p>Menyetujui/menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85) dari Fraksi Partai Gerindra ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI - Sdr. Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. (A-173) dari Fraksi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI - Sdr. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (A-272) dari Fraksi Partai Golkar ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI - Sdr. Martin Manurung, S.E., M.A. (A-369) dari Fraksi Partai NasDem ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI - Sdr. H.A. Iman Sukri, S.H., M.Hum. (A-50) dari Fraksi PKB ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI <p>Komposisi Pimpinan Badan Legislasi DPR RI secara lengkap sebagai berikut:</p> <p>Ketua: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85) Wakil Ketua: Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. (A-173) Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (A-272) Wakil Ketua: Martin Manurung, S.E., M.A. (A-369) Wakil Ketua: H.A. Iman Sukri, S.H., M.Hum. (A-50)</p>	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.		Rapat Badan Legislasi, Rabu, 23 Oktober 2024 pukul 13.29 WIB dalam rangka Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025.	<p>Menyetujui/menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024—2025 akan diisi dengan kegiatan untuk penyusunan Prolegnas tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. - Kegiatan rapat Badan Legislasi yang dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa dimulai pada pukul 13.00 WIB. - Untuk tanggal 25 s.d. 28 November 2024 kegiatan Badan Legislasi ditiadakan untuk memberikan kesempatan kepada Anggota dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. - Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 	
3.		Rapat Badan Legislasi, Kamis, 24 Oktober 2024 pukul 13.32 WIB dalam rangka Pengenalan Sistem Pendukung Pelaksanaan Tugas Dewan dan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang oleh Badan Keahlian DPR RI.	<p>Menyetujui/menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk dapat menginventarisasi RUU yang belum selesai para periode keanggotaan sebelumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 - Produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Keahlian DPR RI dapat disosialisasikan dan didistribusikan secara lebih masif kepada seluruh Anggota untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan. - Badan Keahlian DPR RI diharapkan dapat memiliki rekam jejak yang jelas terkait RUU yang telah diselesaikan hingga RUU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk meminta dan mengumpulkan usulan RUU dari setiap AKD dalam waktu 10 hari kerja setelah terbentuknya Badan Legislasi 	
4.		<p>Rapat Badan Legislasi, Senin, 28 Oktober 2024 pukul 13.33 WIB dalam rangka Presentasi Tim Ahli Baleg atas Evaluasi Prolegnas RUU Tahun 2020—2024 dan Proyeksi Prolegnas RUU Tahun 2025—2029.</p>	<p>Menyetujui/menyepakati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 berdasarkan kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan menjangkau aspirasi dari masyarakat sehingga Prolegnas yang telah disepakati benar-benar dapat dibahas dan diselesaikan. - RUU yang telah masuk dan dibahas pada periode keanggotaan sebelumnya dan belum dapat diselesaikan, untuk dapat masuk kembali dan dibahas pada periode keanggotaan DPR 2024—2029 sebagai RUU Operan. - Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi untuk membuat daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas namun masih belum dapat diselesaikan pembahasannya oleh periode keanggotaan DPR sebelumnya. - Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Legislasi, maka keterbukaan dan transparansi dari Badan Legislasi perlu lebih ditingkatkan dan kemudahan dalam mengakses dokumen RUU. 	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); 2. Indonesian Parliamentary Center (IPC); dan 3. Komisi Nasional Perempuan (Komnas 	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 13.46 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.</p>	<p>Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Perempuan)		<p>dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; c. RUU tentang Perkumpulan; d. RUU tentang Perampasan Aset. <p>B. Indonesian <i>Parliamentary Center</i> (IPC) mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Revisi atas UU MPR, DPR, dan DPD; b. RUU tentang Revisi atas UU Pembantuan Peraturan Perundang-undangan <p>Usulan RUU bersama Koalisi yang diusulkan IPC adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU Keadilan Hukum (Koalisi Energi) b. RUU EBET (Koalisi Bersihkan Indonesia) c. RUU PBJ (Koalisi Antikorupsi) d. Revisi UU KIP (Foni) e. RUU Masyarakat Adat (Koalisi Aman) <p>C. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan 15 (lima belas) RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga; 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. RUU Masyarakat Hukum Adat; c. RUU tentang Kesetaraan Gender; <p>RUU untuk di <i>carry over</i> seperti RUU Revisi atas UU Narkotika, RUU tentang Penyiaran, dan RUU Energi Baru dan Terbarukan.</p>	
6.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); dan 3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu, 30 Oktober 2024 pukul 13.33 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.</p>	<p>Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Komnas HAM mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga b. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) c. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat d. Revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) B. PERLUDEM mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Pemilu b. RUU tentang Pilkada c. Revisi UU Partai Politik 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>C. AMAN mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <p>a. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat</p>	
7.	<p>1. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);</p> <p>2. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); dan</p> <p>3. <i>Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)</i></p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu, 30 Oktober 2024 pukul 13.33 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.</p>	<p>Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:</p> <p>A. LBH APIK mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <p>a. Revisi UU Perkawinan</p> <p>b. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)</p> <p>c. RUU Kesejahteraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)</p> <p>d. RUU Sistem Peradilan Keluarga</p> <p>e. Revisi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum</p> <p>f. Revisi KUHAP</p> <p>g. Penggantian UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia</p> <p>B. JPPR mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p>	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. RUU tentang Keserentakan b. RUU tentang <i>Parliamentary Threshold</i> c. RUU tentang <i>Presidential Threshold</i> d. RUU tentang Amandemen UU Pilkada atau kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada e. RUU tentang Tentang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi/Kab/Kota Pasca Keserentakan Pemilu 2024 <p>C. ICJR mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi KUHAP b. Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika c. RUU Advokat d. RUU Penyadapan e. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah f. Revisi UU 12/2011 jo UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Revisi UU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah g. Revisi UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang h. RUU Bantuan Korban 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI); 2. Asosiasi Petani 	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin, 4 November 2024 pukul 13.33 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.	Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Tembakau Indonesia (APTI); dan 3. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)</p>		<p>A. GAPKI mendorong dan mengusulkan RUU yang merubah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025.</p> <p>B. APTI memberikan usulan kebijakan untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <p>a. Usulan Kebijakan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Perlu ada survei pemetaan jenis di daerah-daerah sentra pertanian. ii. Perlunya adanya Dana penguatan kelembagaan baik asosiasi maupun kelompok Tani. iii. Perlu petugas penyuluh lapangan yang memiliki spesifikasi keahlian dalam bidang tembakau iv. (Mungkin) perlu perubahan metodologi penyuluhan dari yang berbasis pada kuantitas (banyaknya peserta suluh) ke metode penyuluhan intensif (kualitas). v. Perlu adanya regulasi dan kebijakan yang lebih “ketat” untuk penyaluran pupuk dan 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>benih. Dan yang paling utama lagi adalah pengawasan dan penegakan hukumnya.</p> <p>b. Usulan Kebijakan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Perlu ada regulasi baik Undang-undang atau PP tentang pertanian tembakau tujuannya demi melindungi petani, tanaman tembakau dan industri rokok (kretek) ii. Di dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah jangan berkiblat pada kepentingan regulasi global/asing tetapi harus berani bersikap mempertahankan kedaulatan ekonomi tembakau nasional iii. Mendorong adanya kebijakan kewajiban untuk penyerapan tembakau nasional di semua sentra penghasil tembakau (agar tercipta di daerah pertembakauan ada serapan dari semua industri di indonesia untuk bisa saling bergotong royong membangun infrastruktur pembelian di daerah sentra pertembakauan) iv. Membuat kebijakan bahwa penyerapan tembakau nasional sebagai penentuan kuota <i>ijin import</i>) v. Perlu regulasi yang mengontrol lebih ketat lagi untuk persoalan “impor tembakau”. <p>C. API memberikan usulan strategi regulasi Indonesia untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jangka Pendek: 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> i. Pemeriksaan terhadap jasa <i>forwarder</i> melalui sistem OSS dan kebijakan mengenai jasa impor <i>container</i> gabungan. Contoh, jasa perusahaan <i>Bluray</i>. ii. Wajib PI dan border untuk seluruh kode HS TPT dari 50 – 63. iii. Perpanjangan BMTTP pakaian Jadi iv. Penerapan minimum <i>price</i> seperti Tiongkok, India, dan Jepang v. Kerja sama regulasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk membuat regulasi yang meningkatkan ekspor, bukan meningkatkan impor. vi. Regulasi dari Kementerian BUMN (PLN) untuk mendukung penggunaan PLTS atau <i>renewable energy</i> lainnya. vii. Bantuan dari Kementerian Keuangan (BC) dalam hal penegakan importasi. viii. Regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk peraturan FABA dan limbah cair. Baku mutu limbah cair untuk industri TPT yang sama dengan industri lainnya. ix. Diperlukan pengupahan yang lebih pasti setelah putusan MK. x. Sertifikasi PLTA/PLTS sebagai sumber energi terbarukan. xi. Mengembangkan jaringan logistik yang efisien serta menghilangkan praktik premanisme dalam birokrasi yang menghambat industri. <p>b. Jangka Menengah/Panjang:</p>	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> i. Ketersediaan lapangan pekerjaan ii. Isu sertifikasi Hijau untuk setiap <i>brand</i> iii. Biaya logistik: <ul style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur yang kurang mendukung menyebabkan biaya yang tinggi. iv. Bahan baku: <ul style="list-style-type: none"> 1. Memastikan investasi dari Pemerintah untuk bahan baku industri hulu. 2. Untuk kapas, investasi agrikultur (tempat, mesin, SDM, teknologi). 3. Dukungan pemerintah untuk menyediakan bahan baku industri hulu seperti MEG berbasis gas alam v. Bahan penolong <ul style="list-style-type: none"> 1. Insentif dari pemerintah untuk membangun industri bahan penolong vi. Biaya energi; <ul style="list-style-type: none"> 1. Tarif energi listrik yang mendukung daya saing industri TPT di pasar internasional. <ul style="list-style-type: none"> i. Mengusulkan pada 12 malam sampai dengan jam 5 pagi perkaliannya jangan 1, tapi diusulkan 0,75 ii. Mengusulkan kemudahan bagi industri padat karya untuk menyediakan energi listrik terbarukan. 2. Tarif gas dan infrastrukturnya. vii. Memaksimalkan dampak IEU-CEPA terhadap industri TPT 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="309 276 647 480">1. Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta <li data-bbox="309 488 647 651">2. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) <li data-bbox="309 659 647 691">3. Aliansi Filantropi 	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa, 5 November 2024 pukul 13.40 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.</p>	<p>Persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1167 480 1872 675">A. Melly Goeslaw mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1234 603 1794 675">a. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta <li data-bbox="1167 695 1872 1367">B. APKASINDO memberikan usulan kebijakan untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1234 823 1839 1074">a. Perkebunan Sawit Rakyat telah terbukti ikut menyukseskan pembangunan berkelanjutan (SDGS), antara lain Pengentasan Kemiskinan, Menghapus kelaparan dan kekurangan Gizi, Ketahanan Pangan, Kesehatan yang baik, Lapangan Kerja, Pendidikan, serta Pembangunan pedesaan; <li data-bbox="1234 1082 1839 1225">b. Posisi Kelapa Sawit sebagai komoditas global dan strategis, diperlukan UU spesifik yaitu UU Khusus Perkelapasawitan dan Membentuk Badan Khusus Perkelapasawitan Indonesia; <li data-bbox="1234 1233 1872 1367">c. Melakukan Harmonisasi Peraturan Terkait Status dan Kepemilikan lahan; Dampak nyata Perkebunan Sawit Rakyat yang terindikasi masuk dalam Kawasan hutan Petani sawit rakyat 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terancam tidak ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR), SARPRAS, Sertifikasi ISPO, EUDR; sehingga mengganggu Program Ketahanan ENERGY dan Pangan Bapak Presiden PRABOWO;</p> <p>d. Mempercepat Produktivitas Kebun Rakyat Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarpras dan Riset;</p> <p>e. Meningkatkan Kesejahteraan Pekebun melalui Perbaikan Tata Niaga TBS;</p> <p>f. Meninjau ulang Perpres No. 132 tahun 2024 tentang pengelolaan Perkebunan yang merubah BPDPKS menjadi BPDP (Kelapa, Kakao)</p> <p>C. Aliansi Filantropi memberikan usulan strategi regulasi Indonesia untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <p>a. Regulasi Inti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); 2) Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan; 3) Pengumpulan Sumbangan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. <p>b. Regulasi Penunjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 28/2004 tentang perubahan UU Yayasan; 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2) Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Undang-undang Nomor 1/2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik; 4) Undang-undang Nomor 8/2010 Tindak Pidana Pencucian Uang; 5) Undang-undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta; 6) Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa publik; 7) PP Nomor 93/2010 tentang Sumbangan Yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (penjabaran pasal 6 UU Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan), dll	
10.	1. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT); 2. Yayasan Jaan Domestic Indonesia; 3. Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals (INOSHPRO) 4. Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI)	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin, 11 November 2024 pukul 13.24 WIB dalam rangka Mendengarkan pandangan/masukan.	Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut: A. JALA PRT mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu: a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pekerja rumah tangga & pemberi kerja; b. Hak & kewajiban Kedua belah pihak (PRT & pemberi kerja) dicantumkan dalam batang tubuh (R)UU PPRT; c. UU PPRT hanya mengatur PRT yang memang bekerja untuk mencari nafkah.	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>B. Yayasan Domestic Indonesia memberikan usulan kebijakan untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Peraturan Perundang – Undangn pelarangan kekerasan terhadap hewan dengan ketentuan yang berlandaskan prinsip kesejahteraan hewan. b. Membentuk Komite Kesejahteraan Hewan c. Memperkuat edukasi tentang kesejahteraan hewan <p>C. INOSHPRO memberikan usulan strategi regulasi Indonesia untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggantian UU No 1 Tahun 1970 sekaligus mencabut UU Tahun 1930 tentang Uap dan peraturan perundang-undangan lainnya yang substansi pengaturannya dimasukkan dalam UU K3 baru b. Dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademisi Penggantian UU No. 1 Tahun 1970 yang mengikutsertakan unsur Praktisi/Profesi dan Akademisi bidang K3 c. Dibentuknya Badan K3 Nasional yang berada di bawah Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan, yang berfungsi sebagai 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pelaksana, pengawas, dan koordinator lintas sektor program K3 secara Nasional di Indonesia</p> <p>d. Pengawasan kepatuhan dan penegakkan hukum norma K3 tetap dilaksanakan melalui system pengawasan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan</p> <p>e. Memuat pengaturan adanya penanggung jawab K3 setingkat pejabat eselon 2 di setiap sektor atau kementerian dan lembaga sekaligus sebagai focal point dalam koordinasi K3 Nasional</p> <p>f. Memuat pengaturan yang mewajibkan adanya organisasi/unit kerja K3 dan ketersediaan anggaran di setiap perusahaan/tempat kerja</p> <p>g. Pengaturan tentang kewajiban pelatihan K3 berbasis kompetensi dan mempersyaratkan agar SDM penanggung Jawab & Pelaksana K3 memiliki sertifikat lulus uji kompetensi profesi K3 selaras dengan Penerapan program SKKNI/BNS</p> <p>h. Memuat pengaturan tentang Dokumen Proposal Pengelolaan Risiko sebagai prasyarat eksekusi pendirian dan operasi perusahaan/industri berisiko tinggi, memanfaatkan teknologi terkini, agar menempatkan undang-undang secara <i>UpToDate</i> disesuaikan dengan kemajuan inovasi teknologi dan industri (memuat inovasi regulasi yang berbasis risiko, dan <i>goal setting</i>)</p> <p>i. Memuat regulasi yang bersifat anti SLA PP (<i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>) untuk meningkatkan partisipasi pekerja dan publik dalam kepedulian terhadap ancaman keselamatan</p>	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan kesehatan kerja atau situasi dan kondisi/tempat kerja yang tidak selamat dan tidak sehat, sehingga Budaya Keselamatan & Kesehatan dapat tumbuh dan berkembang.</p> <p>j. UU lebih bersifat <i>Proactive, Risk Creator</i> (Pengusaha, BU/BUT, Sektor Pembina Usaha), memiliki akuntabilitas yang lebih besar namun juga kewenangan <i>Self regulated</i> dalam Pengelolaan risiko berdasar sifat dan kemampuannya, namun objektifnya adalah penjaminan terhadap Perlindungan Pekerja, Fasilitas Operasi dan <i>business</i>, Lingkungan hidup dan Masyarakat. (di sini <i>Risk Owner</i> harus <i>clear</i> di tingkat BU/ BUT dan Sektor Pembina Usaha).</p> <p>k. Memuat pengaturan tentang manajemen proses (keselamatan proses).</p> <p>l. Mengamanatkan adanya investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi independen terhadap kasus Kecelakaan besar/fatality</p> <p>m. Pengaturan mencakup Pengelolaan Penerapan K3 disetiap sektor Kementrian dan Lembaga, Institusi baik negeri maupun swasta, sektor usaha Pendidikan, dan setiap jenis pekerjaan termasuk UKM dan fasilitas/area publik/umum (<i>Public Safety</i>) dan Aspek K3 harus menjadi kompetensi dasar setiap orang yang bekerja, dan melakukan penyelenggaraan kegiatan untuk kepentingan umum, termasuk.</p>	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>D. HAPI memberikan usulan strategi regulasi Indonesia untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Majelis Advokat berdasarkan Organisasi Advokat yang ada b. Perlu pengawasan pelaksanaan UU Advokat c. Keterlibatan Advokat dalam penyusunan RUU menjadi pentung berdasarkan pengalaman empirik Advokat sebagai penegak hukum d. Perlu penyamaan persepsi kepada semua Advokat tentang pendidikan profesi Advokat. 	
11.	<p>RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta</p>	<p>Rapat Badan Legislasi, Senin, 11 November 2024 pukul 16.36 WIB dalam rangka Penyusunan RUU.</p>	<p>Menyetujui/menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi perubahan terdapat di antara pasal 70 dan pasal 71, yaitu pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D. 2. Pembahasan hal-hal yang substansi seperti penyusunan UU perlu dibahas lebih mendalam agar tidak terjadinya ketidakcermatan dalam menyusun UU agar tidak terjadinya cacat prosedural dalam menyusun UU. 3. Pembahasan hari ini merupakan risiko dari pasal 73, yang memang kemarin saat membahas UU DKJ terlalu tergesa-gesa. 4. Pembahasan perubahan UU DKJ lebih baik untuk dibahas secara keseluruhan bukan hanya pasal-pasal tersebut saja untuk menghindari hal-hal yang tergesa-gesa seperti ini. 5. Peraturan turunan pada UU DKJ perlu dilakukan penyesuaian perlu adanya <i>mandatory</i>. 	

NO	JUDUL RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.		Rapat Badan Legislasi, Senin, 11 November 2024 pukul 19.15 WIB dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan RUU.	Menyetujui/menyepakati: Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-P Demokrat, dan F-PAN) menyetujui hasil penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Rapat Pleno Penetapan Pimpinan BKSAP Periode 2024-2029 dilaksanakan pada 22 Oktober 2024.	<p>Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH memimpin Rapat Pleno Penetapan Pimpinan BKSAP pada hari Selasa (22/10/2024) di Ruang Diplomasi Parlemen, Nus III Lt. 6.</p> <p>Dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI bidang Polkam menetapkan jajaran Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2024 - 2029, yaitu:</p> <p>Ketua : Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) Wakil Ketua : Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., (F-PDIP) Wakil Ketua : Ravindra Airlangga, B.A., M.S dari (F-PG) Wakil Ketua : M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M. M.B.A. dari (F-PGerindra) Wakil Ketua : Bramantyo Suwondo, M.M.IR dari (F-PD)</p> <p>Kedepannya diharapkan dengan jajaran pimpinan dan anggota BKSAP 2024-2029 dapat berkontribusi positif dalam penguatan peran DPR RI pada diplomasi parlemen dan diplomasi total Indonesia.</p>	
2.	KSB - BKSAP	Rapat Pimpinan ke-1 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 23 Oktober 2024	<p>Rapim ke-1 BKSAP DPR RI membahas penetapan Ketua <i>Desk Internasional</i>, Ketua <i>Desk Regional</i>, Ketua <i>Desk Bilateral</i> dan Ketua <i>Desk Kunjungan Individu</i> dan <i>Alih Bahasa</i> serta berbagai partisipasi DPR RI dalam beberapa persidangan internasional. Dibahas pula rencana penyelenggaraan sidang internasional di Indonesia seperti sidang PUIC dan sidang kedua <i>Asia-Africa Parliamentary Forum</i>.</p> <p>Turut hadir dalam Rapim Perdana BKSAP jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG), M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) dan Bramantyo Suwondo (F-PD) serta pejabat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KSB - BKSAP	Rapat Pleno ke-2 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.	<p>Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan hasil Rapim ke-I BKSAP DPR RI, yaitu menyepakati masing-masing Wakil Ketua BKSAP dalam bidang kerja BKSAP. Wakil Ketua BKSAP Fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri membidangi desk Kerja Sama Internasional; Wakil Ketua BKSAP Fraksi Partai Golkar, Ravindra Airlangga membidangi desk Kerja Sama Regional; Wakil Ketua BKSAP Fraksi Partai Gerindra, M. Husein Fadlulloh membidangi desk Kerja Sama Bilateral; dan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo membidangi desk Kunjungan Perorangan/Individu/AKLNA.</p> <p>Selain itu Pimpinan BKSAP DPR RI juga memaparkan rencana-rencana kegiatan BKSAP mendatang, seperti <i>Solidarity Day for Palestine</i>, FGD dengan Kemlu RI guna menyusun isu prioritas, serta partisipasi dan penyelenggaraan sidang Bali <i>Democracy Forum, 2nd Asia Africa Parliamentary Conference</i> dan <i>19th PUIC Conference and Related Meetings</i>.</p> <p>Pimpinan BKSAP juga telah menyepakati pembentukan tiga panitia kerja antara lain yaitu Panja Asia-Afrika, Panja Oseania dan Panja Eropa-Amerika.</p> <p>Kedepannya diharapkan anggota BKSAP dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan - kegiatan BKSAP yang akan datang.</p>	
4.	KSB - BKSAP	<i>Friendly Talk</i> BKSAP DPR RI dengan Ketua ASEAN <i>Parliamentary Group</i> Parlemen Jerman dan Yayasan FES Indonesia dilakanakan pada 29 Oktober 2024.	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Hon. Ms. Gabriele Katzmarek dan perwakilan FES Indonesia di Gedung DPR RI. Kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Bundestag (Parlemen Jerman) dalam meningkatkan hubungan antar-parlemen dengan DPR RI. Kedua pihak lalu membahas potensi penguatan kerja sama di berbagai bidang, khususnya kesehatan, ekonomi perdagangan, partisipasi politik pemuda dan wanita, serta <i>artificial intelligence</i> .	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua pihak menyepakati bahwa perkembangan teknologi digital khususnya <i>artificial intelligence</i> memiliki potensi dan tantangan yang besar bagi masyarakat. Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga menekankan pentingnya membentuk peraturan dan tata kelola AI guna menghindari penyalahgunaan teknologi tersebut.</p> <p>Membahas perdagangan, Hon. Ms. Gabriele Katzmarek menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa perlu menemukan jalan tengah dan kompromi demi percepatan penyelesaian I-EU CEPA dan isu komoditas kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Pihaknya juga menyampaikan potensi kerja sama riset dan industri kelapa sawit berkelanjutan antara RI-Jerman.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP, M Husein Fadlulloh (F-PGerindra) & Marlyn Maisarah (F-PGerindra).</p>	
5.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> Anggota BKSAP, Gilang Dhielafararez dengan Duta Besar Chile untuk Indonesia dilaksanakan pada 29 Oktober 2024.</p>	<p>Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-PDIP) menerima kunjungan kehormatan/<i>courtesy call</i> dengan Duta Besar Republik Chile untuk Republik Indonesia H.E. Mr. Mario Ignacio Artaza, untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Chile.</p> <p>Pertemuan membahas berbagai peluang kerja sama di bidang parlemen, perdagangan, pendidikan, hingga pangan. Dalam pertemuan ini, Pihak BKSAP menyampaikan rencana kunjungan Ketua DPR RI ke kota Santiago menjadi momen bersejarah menandai kunjungan pertama Ketua DPR RI ke Chile.</p> <p>Mengapresiasi rencana tersebut, Duta Besar Artaza menyambut hangat rencana ini sebagai awal babak baru hubungan diplomatik, terutama menjelang peringatan 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Chili pada tahun depan.</p> <p>Selain itu, pertemuan juga menyoroti pentingnya berbagai kemitraan ekonomi melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chili (IC-CEPA) yang telah berlaku sejak tahun 2017 dan menjadi perjanjian kerja pertama Indonesia dengan negara kawasan Amerika Selatan. Dengan berbagai capaian kinerja tersebut, Indonesia dan Chili diharapkan dapat</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara dan menjalin hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan.	
6.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> BKSAP DPR RI dengan KUI Kedutaan Besar Republik Korea dilaksanakan pada 29 Oktober 2024.	Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh, bersama Pimpinan BKSAP DPR RI, usai pertemuan menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, budaya, dan pendidikan. Berbagai beasiswa dan peluang kerja di Korea Selatan kini terbuka lebar bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga diharapkan dapat menjadi jembatan perdamaian di Semenanjung Korea, mendukung komunikasi dan kedamaian antara kedua pihak yang masih berkonflik. Hal ini menjadi prioritas penting bagi keamanan kawasan Asia, ASEAN, dan dunia.	
7.	BKSAP	FGD BKSAP “Membangun Harmoni Diplomasi untuk Stabilitas dan Perdamaian Global” dilaksanakan pada 30 Oktober 2024.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan <i>Focus Group Discussion</i> dalam rangka menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) BKSAP untuk lima tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan geopolitik global yang dipengaruhi dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan China. “Dunia selalu berubah, dan kita harus bisa beradaptasi dengan tetap memegang prinsip non-blok serta mengedepankan posisi Indonesia sebagai kekuatan tengah yang berpengaruh,” ujar Mardani usai kegiatan tersebut di Tangerang, Banten, Rabu, (30/10/2024). Dengan visi “Berdaya, Berdampak, dan Berpengaruh,” BKSAP optimis untuk periode ini dapat melangkah lebih baik dan berfokus menjalin kemitraan strategis baru, terutama dengan negara-negara di Afrika dan kawasan Asia Pasifik.	
8.	BKSAP	Pimpinan BKSAP mendampingi Wakil Ketua DPR RI dengan Ketua Badan Musyawarah Parlemen Republik Korea	Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga (F-PG) mendampingi Wakil Ketua DPR RI/Korekku Dr. Ir. Adies Kadir menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea H.E. Mr. Mr. Yun Jae-Ok di Gedung DPR RI.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada 1 November 2024.		
9.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Duta Besar Uni Eropa dilaksanakan pada 4 November 2024.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima <i>courtesy call</i> atau kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Mr. Denis Chaibi di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini (4/11/2024).</p> <p>Memimpin pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi hubungan baik yang sudah antara Indonesia dan Uni Eropa serta memperkenalkan Pimpinan BKSAP periode baru, sebagai simbol semangat dalam memperkuat hubungan antara kedua pihak. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PG), Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra), dan Bramantyo Suwondo (F-PD)</p> <p>Duta Besar Denis, yang hadir bersama Wakilnya Mr. Stephane Mechaty dan Atase Legislatif Mr. Antoine Ripoll, juga menyampaikan pentingnya Indonesia sebagai jembatan bagi negara-negara <i>Global South</i> di Asia Tenggara. Uni Eropa juga menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi Indonesia untuk bergabung dengan OECD, seraya menyampaikan harapan terkait percepatan pembahasan IEU-CEPA.</p> <p>Melalui kolaborasi erat ini, Parlemen Indonesia dan Uni Eropa berharap dapat mewujudkan kemitraan yang tidak hanya bermanfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk kemajuan bersama di tingkat global.</p>	
10.	KSB - BKSAP	Rapat Pimpinan ke-2 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 4 November 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera(F-PKS) memimpin Rapim ke-2 BKSAP DPR RI pada hari Senin (04/11/2024) di Gd. Nus III Lt. 6.</p> <p>Rapim ke-2 BKSAP DPR RI membahas partisipasi BKSAP dalam beberapa sidang regional, internasional serta persiapan penyelenggaraan <i>Solidarity Day for Palestine</i> yang akan diadakan pada akhir bulan November.</p> <p>Turut hadir dalam Rapim BKSAP ke-2 jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Ravindra Airlangga (F-PG) dan Bramantyo Suwondo (F-PD) serta pejabat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia dilaksanakan pada 4 November 2024.	<p>Agenda Pimpinan BKSAP DPR RI hari Senin kemarin (4/11/2024) dilanjutkan dengan courtesy call atau kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, H.E. Mr. Vasyl Hamianin ke Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.</p> <p>Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, menjelaskan peran BKSAP sebagai <i>vocal point</i> DPR RI untuk diplomasi parlemen serta komitmen dalam mempererat hubungan internasional, termasuk dengan Ukraina.</p> <p>Duta Besar Vasyl menyampaikan harapannya agar kerja sama kedua negara semakin kuat, terutama melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang akan segera dibentuk. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya peran DPR RI dalam isu perdamaian global, termasuk diskusi terkait konflik di Ukraina.</p> <p>Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PG) dan Bramantyo Suwondo (F-PGerindra), menyatakan kesiapan BKSAP untuk berkolaborasi dengan Parlemen Ukraina dalam upaya diplomasi parlemen dan menjaga hubungan yang positif.</p> <p>DPR RI, khususnya BKSAP, menyampaikan simpati mendalam terhadap situasi di Ukraina dan mendukung upaya perdamaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.</p>	
12.	KSI - BKSAP	<i>10th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)</i> di Brasilia, Brazil dilaksanakan pada 6-8 November 2024.	<p>Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, dan Anggota BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafarez, menghadiri <i>10th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)</i> pada tanggal 6-8 November 2024 di Brasilia, Brazil.</p> <p>Terdapat tiga sesi sidang dalam pertemuan ke-10 para Ketua Parlemen negara-negara anggota G20, yakni 1) <i>The Contribution of parliaments to the fight against hunger, poverty, and inequality</i>. 2) <i>The Role of parliaments in promoting sustainable development</i>. 3) <i>Parliaments in the construction of global governance adapted to the challenges of the 21st century</i>.</p> <p>Dalam Kesempatan ini, Ketua DPR RI menyinggung ketegangan geopolitik dan eskalasi konflik yang terus menimbulkan ancaman terhadap perdamaian</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan keamanan internasional. Keputusan sepihak yang cenderung mengabaikan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mendapat atensi khusus dan komunitas internasional harus memobilisasi tindakan global untuk mengakhiri konflik di berbagai wilayah.</p> <p>Pada sela-sela sidang P20 ini, Ketua DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Singapura, Seah King Peng, dan Ketua Parlemen Portugal, Jose Pedro Aguiar-Branco.</p>	
13.	KSR - BKSAP	Pertemuan BKSAP dengan Sekjen AIPA dilaksanakan pada 11 November 2024.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima kunjungan Sekretaris Jenderal AIPA, Ar. Ms. Siti Rozaimeryanti Dato Haji Abdul Rahman beserta jajaran di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta (11/11/2024).</p> <p>Memimpin pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi kinerja Sekretariat AIPA yang selama ini telah memfasilitasi kegiatan dan sidang-sidang AIPA. Dalam pertemuan tersebut, diperkenalkan pula seluruh Pimpinan dan Anggota BKSAP periode baru, sebagai simbol semangat dan harapan baru, terlebih dengan komposisi anggota BKSAP yang saat ini banyak diisi oleh kaum muda dan perempuan.</p> <p>Dalam pertemuan juga disampaikan hasil Sidang Umum ke-45 AIPA yang sukses terselenggara di Vientiane, Laos tanggal 17-23 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal AIPA juga menyampaikan apresiasi atas asistensi dari Sekretariat BKSAP terhadap Parlemen Laos dalam mempersiapkan perhelatan Sidang Umum ke-45 AIPA sebagai tuan rumah.</p> <p>Ketua BKSAP mengusulkan tindak lanjut implementasi Res 44GA/2023/Pol/06 <i>Resolution on Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-Lasting Peace in Myanmar</i>) yang diusulkan Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA, dengan melakukan kunjungan ke kamp pengungsi Rohingnya. Diharapkan, AIPA dapat memfasilitasi untuk melibatkan Parlemen Anggota AIPA lainnya untuk turut serta.</p> <p>DPR RI juga menyampaikan <i>concern</i> terhadap isu Laut Natuna Utara (Laut Cina Selatan) karena terdapat irisan kepentingan negara-negara ASEAN</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam perairan tersebut. Harapannya, AIPA dapat mensolidkan seluruh Parlemen Anggota AIPA untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan terkait perairan ini.</p> <p>Ketua BKSAP juga mengusulkan dilaksanakannya <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk mengkaji transformasi AIPACODD menjadi AIPA-ACT yang dapat dilakukan secara daring dengan Parlemen Anggota AIPA lainnya.</p> <p>Pertemuan menyepakati untuk dilakukannya FGD yang akan mengkaji kerangka acuan untuk transformasi AIPACODD menjadi AIPA-ACT. Sekretariat AIPA juga akan berkolaborasi dengan Anggota BKSAP untuk kegiatan terdekat AIPA yaitu <i>AIPA Roadshow</i> yang melibatkan Anggota Parlemen Muda.</p>	
14.	KSB - BKSAP	<i>Friendly Talk</i> Pimpinan BKSAP dengan Delegasi Parlemen Korea Selatan dilaksanakan pada 12 November 2024.	<p>Pimpinan BKSAP mengadakan <i>Friendly Talk</i> dengan Delegasi Parlemen Korea Selatan guna membahas penguatan kerja sama RI – Korea Selatan dalam berbagai bidang (12/11/2024).</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menyambut baik kunjungan Delegasi Parlemen Korea Selatan yang dipimpin Hon. Mr. Kim Gihyeon pada hari ini dan menyatakan bahwa ini merupakan komitmen penguatan kerja sama antara RI – Korea Selatan dalam berbagai bidang, khususnya dalam sosial-budaya, investasi dan ketenagakerjaan. Ketua BKSAP juga mengapresiasi hubungan antara DPR RI dan Parlemen Korea Selatan yang telah terjalin erat dan bermanfaat bagi kedua negara.</p> <p>Ketua Delegasi Parlemen Korea Selatan, Hon. Mr. Kim Gihyeon menyampaikan terima kasih atas penerimaan oleh BKSAP dan berharap agar hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin lebih dari 50 tahun dapat terus berkembang. Pihak Korea Selatan juga menyampaikan selamat atas dilantikannya Presiden RI yang baru serta berharap pemerintahan yang baru dapat berkontribusi positif pada penguatan hubungan kerja sama RI – Korea Selatan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua pihak juga sepakat akan pentingnya perlindungan tenaga kerja RI di Korea Selatan dan sebaliknya. Tenaga Kerja yang berasal dari Indonesia dan Korea Selatan memberikan pengaruh positif kepada perekonomian dan perindustrian kedua negara. Kedepannya DPR RI dan Parlemen Korea Selatan akan terus menggali potensi kerja sama tidak hanya pada ekonomi dan penanganan perubahan iklim, namun juga pada perlindungan Hak Asasi Manusia.</p> <p>Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PD) beserta jajaran Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1		Rapat Pemilihan dan Penempatan Pimpinan tanggal 22 Oktober 2024.	Pemilihan dan Penetapan Pimpinan MKD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, dan Lain-lain.	
2	DPRD Kota Salatiga	Menerima Audiensi tanggal 25 Oktober 2024.	Materi: Kinerja dan Anggaran DPRD Pasca Putusan Mahkamah Agung terkait Perpres 53 Tahun 2023.	
3		Paket <i>Meeting</i> di Griya Sabha, Kopo tanggal 31 Oktober - 2 November 2024.	Tema: "Penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Etika DPR RI".	
4		Paket <i>Meeting</i> di Griya Sabha, Kopo tanggal 6-8 November 2024.	"Strategi Pengawasan Etika Terhadap Anggota DPR RI Periode 2024-2029".	
5	Pimpinan Baleg DPR RI	Rapat tanggal 11 November 2024.	Penjelasan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.	
6		Rapat Intern MKD tanggal 11 November 2024.	Pengambilan keputusan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.	
7	DPRD Kabupaten Tana Tidung	Menerima Audiensi tanggal 11 November 2024.	Konsultasi dan Koordinasi tentang Kode Etik dan Tata Beracara.	
8		Rapat Verifikasi tanggal 12 November 2024.	Permintaan keterangan kepada Anggota DPR RI yang diduga melakukan promosi judi online.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Penetapan Pimpinan BURT Periode 2024-2029 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra. Selasa, 22 Oktober 2024.	Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (A-565/Fraksi Partai Demokrat/Banten 1) Wakil Ketua: 1. Indah Kurnia, S.E., M.M. (A-214/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Jawa Timur I) 2. H. Ilham Pangestu (A-265/Fraksi Partai Golongan Karya /Aceh II) 3. Hj. Novita Wijayanti, SE., MM. (A-114/Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya/Jawa Tengah VIII) 4. Dr. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi (A-504/Fraksi Partai Amanat Nasional/Jawa Barat IV)	
2.	-	Rapat Pimpinan BURT Rabu, 23 Oktober 2024 Agenda: Pembahasan Rancangan Jadwal Kegiatan BURT MS I TS 2024-2029.		
3.	-	Rapat BURT (Intern) Kamis, 24 Oktober 2024 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS I Tahun Sidang 2024-2025.		
4.	-	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 25-27 Oktober 2024 ke Banten.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
5.	-	<p>Rapat BURT dengan Setjen DPR RI (dihadiri Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra) Rabu, 30 Oktober 2024. Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI. 2. Penjelasan Sekjen DPR RI tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan Hasil Kajian Penyesuaian Hak-hak Keuangan Anggota DPR RI. 3. Penjelasan Sekjen DPR RI tentang Gambaran Umum Kebutuhan Anggaran DPR RI Tahun 2025. 		

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	PT. Asuransi Jasindo	Rapat BURT Kamis, 31 Oktober 2024. Agenda: 1. Perkenalan BURT DPR RI dengan Direksi dan Manajemen PT. Asuransi Jasindo. 2. Penjelasan PT. Asuransi Jasindo terkait Program Jaminan Kesehatan Utama bagi Anggota DPR RI dan keluarga.		
7.	-	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 1-3 November 2024 ke Jawa Barat.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	Sekretariat Jenderal	Rapat BURT Rabu, 6 November 2024. Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI Tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2024.	Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.4.480.583.939.930,- (<i>Empat triliun empat ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah</i>) atau 73,73% dari pagu sebesar Rp.6.076.918.641.000,- (<i>Enam triliun tujuh puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>).	
9.	Sekretariat Jenderal	Rapat Panja BURT Rabu, 6 November 2024. Agenda: Pembahasan Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2024 Satker Dewan.	Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2024 Satker Dewan sebesar Rp.3.341.608.576.124,- (<i>Tiga triliun tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah</i>) atau 75,22% dari pagu sebesar Rp.4.442.416.671.000,- (<i>Empat triliun empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i>).	
10.		Rapat Panja BURT Rabu, 6 November 2024. Agenda: Pembahasan Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2024 Satker Setjen.	Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2024 Satker Setjen sebesar Rp.1.138.975.363.806,- (<i>Satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah</i>) atau 69,68% dari pagu sebesar Rp.1.634.501.970.000,- (<i>Satu triliun enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>).	
11.	Pimpinan AKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI	Rapat BURT Kamis, 7 November 2024. Agenda: Penjelasan Sekjen tentang Realisasi dan Rencana Optimalisasi Anggaran DPR RI (AKD) Tahun 2024.		
12.	-	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 8-10 November 2024 ke Banten.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Ketua DPR RI bidang Ekonomi & Keuangan • Pimpinan BAKN • Anggota BAKN 	Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan BAKN DPR RI RI Masa Keanggotaan 2024 – 2029 dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB.	<p>Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Pimpinan BAKN DPR RI Masa Keanggotaan 2024 – 2029 sesuai hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2024, dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M sebagai Ketua BAKN dari Fraksi PDIP. 2) H. Andi Achmad Dara, S.E sebagai Wakil Ketua BAKN dari F-Pgolkar. 3) Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M sebagai Wakil Ketua BAKN dari Fraksi Partai Gerindra. 4) Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A. sebagai Wakil Ketua BAKN dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 5) Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si sebagai Wakil Ketua BAKN dari Fraksi Partai Demokrat. 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan BAKN • Anggota BAKN 	Rapat Intern BAKN DPR RI RI Masa Keanggotaan 2024 – 2029 dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB.	<p>Rapat dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M dalam rangka Pengenalan Tupoksi BAKN DPR RI dan Perkenalan Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI Masa Keanggotaan 2024-2029 sesuai hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2024.</p> <p>Sesuai keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 telah memutuskan penambahan jumlah dan komposisi keanggotaan BAKN DPR RI menjadi 19 anggota dengan jumlah dan komposisi fraksi pada susunan Pimpinan yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Komposisi Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI yaitu:</p> <p><u>Pimpinan</u></p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>1) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M F-PDIP 2) H. Andi Achmad Dara, S.E F-PGolkar 3) Ir. H.M. Endipat Wijaya, M.M F-PGerindra 4) Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A. F-PKS 5) Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si F-PDemokrat</p> <p><u>Anggota</u></p> <p>1) Dr. H. Musthofa, S.E., M.M F-PDIP 2) Sarifah Ainun Jariyah, S.I.P F-PDIP 3) Melchias Markus Mekeng F-PGolkar 4) Erwin Aksa F-PGolkar 5) Annisa, M.A., Mahesa F-PGerindra 6) Ade Rezki Pratama, S.E., M.M F-PGerindra 7) Dr. Shohibul Imam, CA., CPA. F-PNasdem 8) Arjuna Sakir, S.E., M.M F-PNasdem 9) Bertu Merlas, S.T F-PKB 10) Eka Widodo F-PKB 11) Amin, Ak., M.M. F-PKS 12) H. Ahmad Najib Qodratullah, S.E., M.H F-PAN 13) Primus Yustisio, S.E., M.A.P F-PAN 14) Zulfikar Hamonangan, S.H F-PDemokrat</p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan BAKN • Badan Keahlian 	Audiensi dilaksanakan pada Senin, 28 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.	<p>Audensi dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.</p> <p>Agenda Audensi adalah dalam rangka Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Paparan terkait Ikhtisar Hasil Pemerikssan BPK RI Semester I Tahun 2024 khususnya pada Kementerian/ Lembaga yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Paparan terkait Temuan BPK RI yang menimbulkan Kerugian Negara Terbesar Tahun Anggaran 2023 pada Kementerian/Lembaga.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kesimpulan:</p> <p>a) Tugas BAKN menurut Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah melakukan Penelahaan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR RI, menyampaikan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi, dan memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.</p> <p>b) Terdapat penjelasan permasalahan opini WDP pada beberapa Kementerian di Tahun Anggaran 2023, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Badan Pangan Nasional (Bappenas) • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian dengan kerugian negara terbesar tahun anggaran 2023 adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Kesehatan sebesar Rp.218,09 Miliar (<i>Dua ratus delapan belas miliar sembilan puluh juta rupiah</i>). b. Kementerian PUPR Rp.564,2 Miliar (<i>Lima ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta rupiah</i>). c. Kementerian Perhubungan Rp.62,2 Miliar (<i>Enam puluh dua miliar dua ratus juta rupiah</i>). 	
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai, Bali	Kunjungan Kerja BAKN ke Provinsi Bali dilaksanakan pada 1 – 3 November 2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai, Bali dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pramella Yunidar Pasaribu, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali 2. Setyo Budiwardoyo, S.E., M.Si, Plh Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Bali. 3. Suhendra, S.E., M.M., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I khusus, S.E, 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>M.M., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai Bali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda Kunjungan Kerja: Untuk mendapatkan masukan dalam rangka Penelaahan BAKN terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian • Kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurai Rai, Bali dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan paspor, Visa, Izin Keimigrasian, dan izin masuk kembali, serta pelayanan keimigrasian lainnya dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI. 	
5	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, Tanjung Perak, Surabaya	Kunjungan Kerja BAKN ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada 1 – 3 November 2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Surabaya, Jawa Timur dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1) Heni Yuwono, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 2) Herdaus, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur; 3) I Gusti Bagus M. Ibrahiem, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak; 4) Dani Yekti Rahajeng, Analis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM; • Agenda Kunjungan Kerja: untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan LHP BPK RI terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI • BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan secara langsung, masukan dan pandangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan paspor, visa, izin keimigrasian dan izin masuk kembali, 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			serta pelayanan keimigrasian lainnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Tanjung Perak, Jawa Timur.	
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan BAKN • Anggota BAKN • Badan Keahlian 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Selasa, 5 November 2024.	<p>Rapat dipimpin oleh Ketua BAKN DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M dengan agenda acara Rapat Dengar Pendapat hari ini untuk membahas Penyempurnaan Tata Tertib terkait penguatan BAKN DPR RI, IHPS Semester I Tahun 2024, dan terkait temuan BPK RI atas OJK pada Tahun sebelumnya, dan mengenai subsidi Pupuk dan subsidi Listrik.</p> <p>Berdasarkan LHP BPK RI tahun 2019-2023 terdapat penurunan opini atas Laporan Keuangan OJK. Sejak tahun 2019-2022 BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sedangkan pada tahun 2023 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).</p> <p>Terdapat empat kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WDP terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertanian 2. Badan Pangan Nasional 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika <p>Penyempurnaan Tata Tertib BAKN DPR RI dengan menambahkan kewenangan BAKN DPR RI untuk melakukan pembahasan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas penugasan oleh Badan Musyawarah, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi terkait tidak membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam jangka waktu 1 (satu) kali masa sidang terhitung sejak penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI; atau b. Pertimbangan lain dari Badan Musyawarah 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP)	Kunjungan Kerja ke Serang, Banten dilaksanakan pada 15 – 17 November 2024	<p>Pertemuan dengan kementerian Pertanian ke BSPI Banten dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Susanto, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Fuadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian; 3. Ismatul Hidayah, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. <p>Beberapa kesimpulan hasil Kunjungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengembangkan penerimaan PNBP agar nantinya tidak hanya menjadi penerimaan rutin akan tetapi bisa lebih inovatif dan kreatif. Perkembangan atas pemasukan PNBP pada satker-satker Kementerian Pertanian masih dapat dimaksimalkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan Balai seperti BPSIP Banten bisa lebih dimaksimalkan memberikan inovasi kepada Petani seperti inovasi alat pertanian dan metode pertanian yang modern. • BAKN nantinya akan terus melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNBP salah satunya dari Kementerian Pertanian. PNBP ini nantinya diharapkan dapat kembali lagi kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan petani. • Terkait dengan Opini WDP pada Kementerian Pertanian tahun 2023, BAKN akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam upaya memperbaiki tata kelolanya agar Opini di tahun berikutnya dapat kembali WTP. • Terkait dengan kegiatan impor produk pertanian dan peternakan yang banyak merugikan masyarakat Indonesia khususnya petani dan peternak, BAKN DPR RI mengharapkan agar Kementerian Pertanian dapat lebih peduli dan tanggap terhadap tersebut. Kementerian Pertanian dapat melakukan langkah-langkah seperti pembatasan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kuota impor dan memberlakukan tarif impor pada setiap izin impor yang dikeluarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAKN DPR RI berhadap bahwa Kementerian Pertanian lebih memperhatikan perkembangan balai-balai dibawah UPT Kementerian Pertanian agar lebih berkembang dan melakukan inovasi (teknologi alat-alat pertanian) untuk mendorong kemajuan petani di Indonesia. 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat • Balai Inseminasi Buatan (BIB) 	<p>Kunjungan Kerja ke Lembang, Jawa Barat dilaksanakan pada 15 – 17 November 2024.</p>	<p>Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Makmun, M.Sc. 2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, drh. Pujo Harmadi, MP 3. Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Gun Gun Gunara, S.Pt., MP. <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI Nomor 21.b/LHP/XVII/05/2024, Beberapa permasalahan seperti pengelolaan PNBPN, belanja barang, dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan, telah diatasi dengan langkah-langkah konkret seperti penyeteroran kembali ke kas negara dan perbaikan prosedur internal - BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, khususnya melakukan pembenahan pelaksanaan belanja sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas - Kementerian Pertanian berfokus pada: <ol style="list-style-type: none"> a) peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, optimalisasi pembayaran 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>non-tunai, dan penguatan budaya tertib SPJ untuk mencegah permasalahan yang sama di masa depan</p> <p>b) memperoleh opini WTP dengan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi penggunaan sistem informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAKN DPR RI mendorong penyusunan kebijakan terkait aset dan pendanaan serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK agar menjadi prioritas untuk memperbaiki laporan keuangan - BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan tambahan anggaran guna meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan PNBP yang lebih optimal - Pengelolaan PNBP yang berasal dari aset BMN perlu diatur agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk optimalisasi kegiatan, mengingat saat ini anggaran tersebut terkendala pada sumber daya yang terbatas. 	
